

2021-2026



## RENCANA STRATEGIS

Dinas Kesehatan  
Kabupaten Berau

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
LATAR BELAKANG .....	1
LANDASAN HUKUM.....	3
MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	7
SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	11
KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KAB. BERAU .....	13
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	23
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	24
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	24
TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2021-2026 .....	28
TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SERTA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROPINSI .....	29
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN.....	42
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH .....	42
BAB V	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI	
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	62
BAB VIII	
PENUTUP.....	72

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarkatu...

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Karunianya akhirnya Rencana Strategis (Rensta) Tahun 2021 -2026 Dinas Kesehatan Berau dapat terselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 01 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau tahun 2021-2026, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan di Kabupaten Berau Dinas Kesehatan Kabupaten Berau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif di Kabupaten Berau secara sistematis dan berkesinambungan.

Bersama ini kami mengajak kepada semua unsur Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan “**Sehat dan Mandiri**”.

Besar harapan kami dengan perencanaan strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau maupun pihak-pihak lainnya yang memerlukan dalam rangka penyusunan perencanaan maupun dasar pengambilan kebijakan khususnya dibidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak, yang telah membantu dan berkontribusi sehingga memungkinkan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.

Tim Penyusun

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

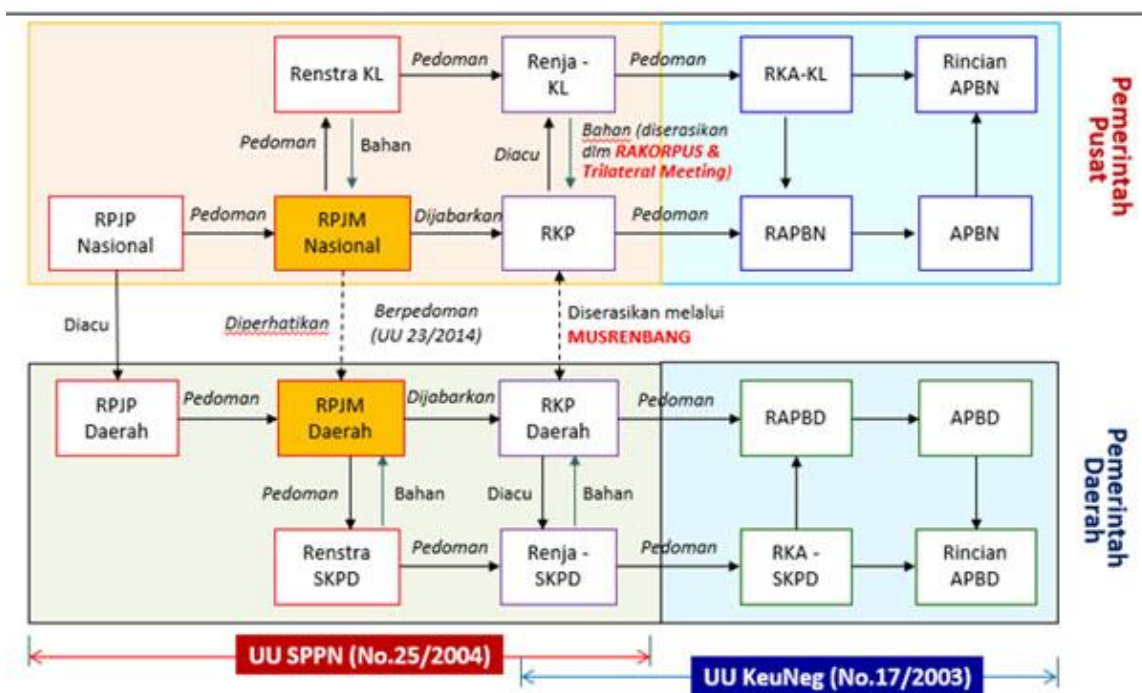
Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKP, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
  19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
  20. Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

21. Pereraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

#### **1.3.2. Tujuan**

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari perangkat daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang ada.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### 2.1.1. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

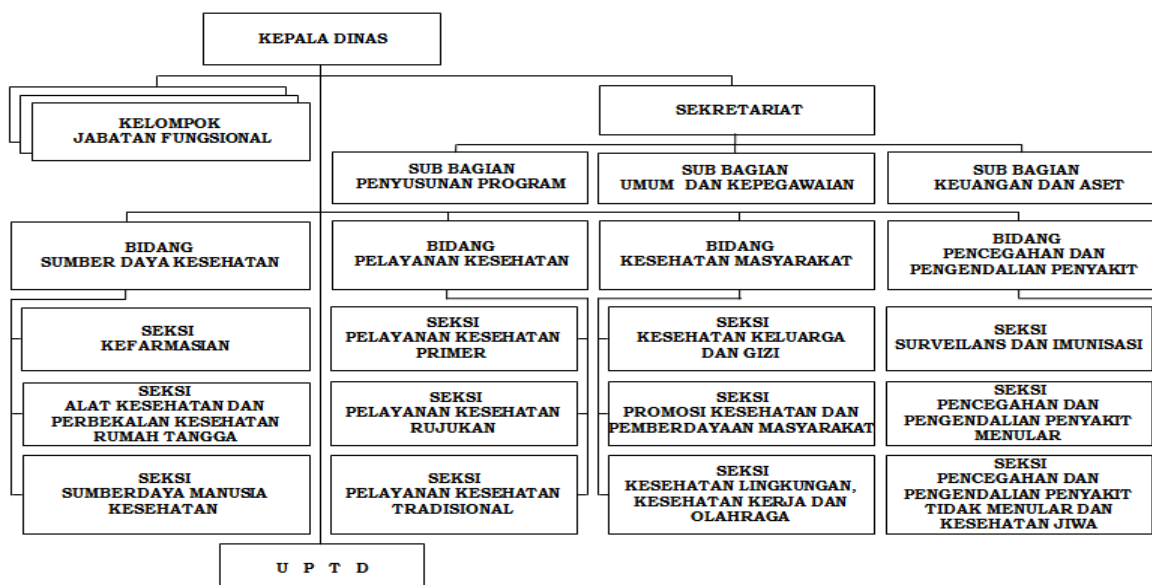
#### 2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang seperti pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau.

### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan rincian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang kesehatan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang kesehatan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **B. Sekretaris**

Dinas Kesehatan Kabupaten B e r a u dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu

oleh 1 (satu) Sekretariat dimana Sekretariat dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun tugas Sekretaris antara lain :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, S1K, Hukum, Tindak lanjut Audit, Aset dan protokol serta urusan umum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **C. Kepala Bidang**

Kepala dinas juga dibantu oleh 4 (empat) Bidang, setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Bidang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi :

- 1) Bidang Sumber Daya Kesehatan, meliputi :
  - a. Seksi Kefarmasian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang kefarmasian.
  - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- 2) Bidang Pelayanan Kesehatan, meliputi :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan lesehatan primer.
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi :
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehtan Masyarakat di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang surveilans dan imunisasi.
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu :

- a) 21 UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- b) 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- c) 1 UPT Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kab Berau

Secara umum jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kab Berau per tahun 2020 berjumlah 1.286 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 546 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 740 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2020

No	Pangkat	Eselon	Jumlah
1	IV/b	II B	1
2	IV/b	III A	1
3	IV/b	III B	1
4	IV/a	III B	2
5	III/d	III B	1
6	III/d	IV A	33
7	III/c	IV A	3
8	III/b	IV A	2
10	III/d	IV B	9
9	III/c	IV B	6
11	III/b	IV B	5
12	IV/a		2
13	III/d		55
14	III/c		47
15	III/b		104
16	III/a		89
17	II/d		112
18	II/c		65
19	II/b		6
20	II/a		1

21	I/d	1
<b>Total PNS</b>		546

Sumber data: Sub Bagian umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Berau

Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2020

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SMA/SMK/STM Atau Sederajat	148
2	D3	402
3	S1	187
4	S2	3
Total		740

### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Kab. Berau

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3. Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020

No	Nama/JenisBarang	Volumen/Satuan	TahunPembelian	Kondisi
1	Sepeda Motor	1 Buah	2000	RusakBerat
		1 Buah	2001	Kurang Baik
		1 Buah	2003	RusakBerat
		1 Buah	2003	Kurang Baik
		5 Buah	2007	RusakBerat
		2 Buah	2007	Kurang Baik
		1 Buah	2007	Baik
		1 Unt	2009	Kurang Baik
		2 Buah	2010	Baik
		9 Buah	2012	baik
		2 Buah	2013	baik
		4 Buah	2018	baik
3 Buah	2019	baik		
2	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 Buah	2000	Kurang Baik
		3 Buah	2001	Baik
		6 Buah	2001	RusakBerat
		4 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2005	RusakBerat
3	MejaTulis	2 Buah	2000	Kurang Baik
		3 Buah	2001	Baik
		3 Buah	2001	Kurang Baik
		4 Buah	2001	RusakBerat
		3 Buah	2005	Kurang Baik
		1 Buah	2005	Baik
		2 Buah	2007	Kurang Baik
1 Buah	2007	Baik		
4	PC Unit	1 Buah	2000	RusakBerat
		1 Buah	2001	RusakBerat
		1 Buah	2002	RusakBerat
		1 Buah	2005	RusakBerat
		1 Buah	2008	Baik
		1 Buah	2008	RusakBerat

No	Nama/JenisBarang	Volumen/Satuan	TahunPembelian	Kondisi
		2 Buah	2009	baik
		3 Buah	2010	Baik
		6 Buah	2011	baik
		8 Buah	2013	baik
		3 Buah	2018	baik
		5 Buah	2019	baik
5	Filling Besi/Metal	1 Buah	2001	Kurang Baik
		1 Buah	2002	RusakBerat
		1 Buah	2002	Kurang Baik
		1 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2005	Kurang Baik
		4 Buah	2012	Baik
6	KursiPutar	3 Buah	2001	RusakBerat
		1 Buah	2005	Kurang Baik
7	KursiLipat	2 Buah	2001	RusakBerat
		3 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2008	Kurang Baik
		1 Buah	2010	baik
		34 Buah	2014	baik
8	MejaKomputer	3 Buah	2001	Kurang Baik
9	Meja Biro	2 Buah	2001	RusakBerat
10	KursiPlastik	4 Buah	2001	RusakBerat

Sumber Data: Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. Berau

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KAB. BERAU

Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau termuat dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	11	10	10	10	9	8.00	9.00	8.00	5.00	8.00	127.27	110.00	120.00	150.00	111.11
2	Angka Kematian Bayi (IMR)	/1000 kh	23	21	20	19	18	16.17	17.76	18.36	19.33	22.58	129.71	115.43	108.20	98.26	74.56
3	Angka Kematian Anak Balita (IKU)	/1000 kh	20	19	18	17	16	7.00	3.06	3.67	1.74	15.00	165.00	183.89	179.61	189.76	106.25
4	Persentase BBLR	%	4,4	4,1	3,9	3,6	3,3	9.78	8.42	5.21	5.30	7.30	-22.27	-5.43	66.41	52.78	-21.21
5	Prevalensi Balita Kurang Gizi	%	30	8	7	6	6	2.00	2.49	2.92	3.53	5.40	193.33	168.87	158.29	141.17	110.00
6	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence)	%	<1	<1	<1	<1	<1	0.48	0.42	0.53	0.36	0.09	153.62	141.04	160.00	190.00	146.67
7	Angka Kesakitan DBD (IR DBD)	/100.000 pddk	250	230	200	175	140	201.00	202.67	62.00	74.00	213.00	118.93	173.04	163.00	78.29	56.43
8	Prevalensi HIV (Persen)	%	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0.14	0.02	0.91	0.02	0.01	195.92	14.29	195.92	197.96	171.43
9	Persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati	%	45	100	100	100	100	100.00	0.20	99.61	100.00	100.00	199.56	100.39	100.00	100.00	100.00
10	Persentase desa yang melaksanakan posbindu	%	60	70,9 1	81,8 2	90,9 1	100	100.00			116.00	139.00	0.00	0.00	141.77	152.90	100.00
11	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	%	50	80	85	90	92	26.09	47.83	47.83	83.00	83.00	52.17	59.78	56.27	92.22	90.22

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12	Persentase Pemanfaatan Puskesmas (Utilisasi)	%	91,5	92	92,5	93	94				98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	105.38	104.26
13	Persentase cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Persentase Pelayanan Dasar Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00
15	Persentase Pelayanan Rujukan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	40	35	30	25	20		85	87	10.11	11.3	200.00	-42.86	-90.00	159.56	143.50

Berdasarkan table 2.4 di atas, dapat ditemukan beberapa kesenjangan/hal-hal yang belum tercapai antara lain:

#### 1. Angka kematian Ibu

Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu, mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Secara Kabupaten penurunan kematian Ibu tersebut mencapai realisasi target yang diinginkan (8 orang) jika dibandingkan target awal yang ditetapkan sebelumnya (9 orang). Tetapi jika dibandingkan capaian AKI tahun 2019 sebanyak 5 orang maka tahun 2020 ini ada kenaikan. Ada perubahan pola tempat kematian ibu pada tahun 2020. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya kematian ibu banyak terjadi di tingkat rumah tangga dan masyarakat (hulu), tetapi untuk tahun 2020 dari delapan (8) kasus kematian Ibu ini, 5 (lima) orang kematian terjadi di RS rujukan (hilir). Sedangkan 2 kasus kematian lainnya terjadi di perjalanan pada saat dirujuk dan 1 kasus kematian ibu di rumah. Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg berkompeten dan di fasilitas kesehatan yang terstandart, serta perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Disamping itu pentingnya melakukan intervensi lebih ke Hulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI. Tahun 2020 ini kematian Ibu di kabupaten Berau banyak di sebabkan oleh eklampsia sebanyak 5 orang, sedangkan untuk penyebab atonia 1 orang, meningitis 1 orang dan perdarahan 1 orang.

#### 2. Angka Kematian Bayi

Upaya pemeliharaan kesehatan Anak dimulai sejak di dalam rahim hingga anak berusia 5 tahun, diantaranya dengan melakukan pelayanan kesehatan Ibu hamil, pelayanan neonatal esensial, pelayanan tumbuh dan kembang Anak (Bayi, Anak Balita). Upaya pemeliharaan kesehatan Anak ini

adalah salah satu upaya mempersiapkan generasi penerus yang sehat, berkualitas dan sebagai Upaya penurunan angka kematian Anak (Bayi dan Anak Balita).

Kematian Bayi di kabupaten Berau selama beberapa tahun ini mengalami peningkatan, kematian bayi tahun 2016 sebanyak 76 (16,16 KLH), tahun 2017 ini naik menjadi 87 kasus (17,755/1000 KLH) sementara itu pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 95 kasus atau sebesar 18,36 per 1000 KLH dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 100 kasus (19,33/1000 KLH). Adapun pada tahun 2020 jumlah kematian bayi menjadi 118 kasus (22,58/1000 KLH). Berdasarkan data tersebut, memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, pencapaian indikator kinerja “Penurunan Angka kematian Bayi” masih tinggi 22,58 /1000 KLH, di sertai dengan tingginya Bumil eklampsia, Bumil KEK dan Bumil Anemia. Artinya masih perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam Penurunan kematian Bayi, dimulai dari pencegahan dan penanganan Anemia pada Remaja putri serta pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Kasus Kematian bayi tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh BBLR yaitu 48 kasus dan Premature 5 kasus (masuk dalam penyebab kematian lain-lain). Hal ini ada kaitan dengan masih tingginya bumil KEK sebesar 635 dan Bumil Anemia. 1137. Begitu pula ada kenaikan untuk Bumil dengan hipertensi/ preeklampsia yang kesemuanya memicu BBLR yang berujung pada kematian. Sedangkan Bumil KEK yang mendapat PMT Bumil dengan persentase 95,7%. Dan juga sekitar 73,6% Persentase Bumil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan.

### 3. Angka kematian Anak Balita

Kematian Anak Balita di Kabupaten Berau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 7 kasus atau sebesar 1,49 per 1000 KLH dan meningkat menjadi 15 kasus atau 3,06 per 1000 KLH sepanjang tahun 2017, dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yaitu 19 kasus atau sebesar 3,67 per 1000 KLH, tahun 2019 turun menjadi 9 kasus (1,74 / 1000 KLH). Tahun 2020 ada peningkatan 16 kasus atau sebesar 3,06/ 1000 KLH. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian Anak Balita antara lain:

- a) Masih ada perawat dan Bidan Desa yang belum terlatih tatalaksana Balita sakit dengan pendekatan MTBS.
- b) Masih ada Bidan Desa yang belum terlatih Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak.
- c) Masih adanya tenaga yang sudah dilatih tetapi belum mampu melaksanakan hasil pelatihan.
- d) Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada Anak Balita sesuai standar.
- e) Belum maksimalnya sistem pencatatan pada kohort Anak Balita
- f) Pentingnya monev pasca pelatihan
- g) Belum maksimalnya Ketersediaan sarana dan prasarana pasca pelatihan.
- h) Ada beberapa Puskesmas yang belum melaksanakan kelas ibu balita
- i) Faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi serta perlunya penerapan pola pendekatan MTBS bagi puskesmas yang belum melaksanakan.

#### 4. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia gestasi. BBLR merupakan istilah untuk mengganti bayi prematur karena terdapat dua bentuk penyebab kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram yaitu umur kehamilan kurang dari 37 minggu, berat badan lebih rendah dari semestinya sekalipun cukup bulan atau karena kombinasi keduanya.

Berdasarkan data Tahun 2020, Angka Kematian Bayi (AKB) disebabkan oleh BBLR sebagai penyebab utamanya. Baru kemudian disusul Asfiksia, Kelainan Kongenital, Premature dan lain-lain. Kabupaten Berau selama beberapa tahun ini menunjukkan kenaikan angka BBLR, terakhir untuk tahun 2020 realisasi sebesar 7,3 % dari target 3,3 %.

BBLR terjadi akibat hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu faktor ibu, janin dan plasenta. Namun hambatan pertumbuhan janin juga dapat disebabkan oleh multifaktor. Faktor ibu meliputi usia ibu, umur kehamilan, jarak kelahiran, paritas, status gizi, pendidikan, sosial ekonomi, mengalami komplikasi kehamilan seperti anemia, perdarahan antepartum, hipertensi, preeklamsi, KPD, keadaan gizi

kurang. Faktor janin dan plasenta meliputi kelainan kromosom, IUGR, infark plasenta dan disfungsi plasenta. Faktor lingkungan meliputi paparan radiasi, alkohol, terpapar zat beracun seperti asap rokok.

Hasil pendataan tahun 2020 faktor resiko pada ibu masih didominasi anemia dan KEK. Selain itu juga terdapat penambahan trend yakni meningkatnya Bumil dengan hipertensi dan preeklamsi. Ini ditandai dengan kasus kematian ibu lebih banyak dipengaruhi eklamsi. Selanjutnya disusul faktor penyebab BBLR lainnya yaitu usia ibu, jarak kehamilan, paritas.

#### 5. Kurang Gizi pada Anak Balita

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indikator Program Gizi antara lain:

##### a) *Personil*

1. Ketersediaan tenaga gizi belum memenuhi kebutuhan kabupaten secara umum, rata-rata puskesmas hanya memiliki 1 orang TPG.
2. Pengelolaan program gizi masyarakat oleh TPG yang masih lemah.
3. Masih kurangnya kompetensi TPG dalam melaksanakan proses asuhan gizi puskesmas.
4. Masih lemahnya kemampuan TPG dalam mengembangkan PMT berbasis bahan pangan local.
5. Masih kurangnya pemahaman TPG tentang indikator program gizi.

##### b) *Metode/ Proses Bisnis Internal*

1. Masih adanya Posyandu yang tidak aktif terutama masa pandemi dimana untuk wilayah perkotaan posyandu banyak yang dinonaktifkan sehingga cakupan kegiatan Posyandu banyak yang tidak berjalan sesuai program terutama balita ditimbang (D/S) hasilnya rendah yaitu 26,06 %, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 60%, juga hasil kegiatan yang lain yang tidak mencapai target.
2. Pemantauan sasaran yang belum optimal disebabkan belum ada pembagian wilayah kerja untuk TPG khususnya di wilayah perkotaan dan Pemetaan sasaran (Bumil dan Balita) yang belum maksimal. Sehingga mengakibatkan kosongnya data pemantauan.

3. Untuk TPG yang hanya satu orang di puskesmas masih kesulitan dalam mengelola pola layanan gizi antara pelayanan dalam gedung dan luar gedung.
  4. Masih ada Bumil pada saat kunjungan antenatal di puskesmas yang tidak bertemu TPG untuk memperoleh edukasi karena TPG sedang kegiatan luar gedung.
  5. Masih kurangnya sosialisasi manfaat ASI sehingga pemahaman manfaat ASI masih kurang di masyarakat bahkan di kalangan petugas kesehatan.
  6. Belum maksimalnya pojok gizi/konsultasi gizi di puskesmas.
- c) *Pasien/ Penerima Layanan*
1. Adanya pergeseran pola makan yang lebih banyak mengonsumsi makanan siap saji atau kemasan yang banyak mengandung garam dan MSG serta minim serat, vitamin dan mineral.
  2. Tidak semua ibu hamil dan balita datang ke Puskesmas dan Posyandu. Adanya ketakutan pasien untuk datang ke puskesmas selama berlangsungnya pandemi Covid mulai bulan Maret 2020.
  3. Kehamilan yang tidak terpantau karena ibu hamil sering berpindah tempat/ domisili serta ibu hamil tidak periksa ke Puskesmas tempat domisili.
  4. Kurangnya minat Ibu hamil dan Keluarga untuk kelas ibu hamil, terutama di daerah perkotaan (Pusk. Tanjung Redeb, Bugis, Gunta, Sambaliung dan Teluk Bayur).
- d) *Alat, Obat, Sarana dan Prasarana*
1. Kurangnya prasarana serta kualitas pelayanan di posyandu, terutama sistem 5 meja belum berjalan optimal.
  2. Kurangnya sarana timbangan berat badan (dacin) dan alat ukur tinggi/panjang badan serta sarana kelengkapan Posyandu lainnya.
  3. Masih kurangnya fasilitas ruangan khusus konseling gizi di puskesmas.
  4. Keterbatasan alat pengolah data berupa computer yang akan digunakan dalam aplikasi ePPGBM.
- e) *Lintas Sektor, Lintas Program dan Pemerintah*

1. Masih ada komitmen yang kurang para pemangku kepentingan/ lintas sektor terhadap pengembangan Posyandu.
2. Peran aktif masyarakat yang rendah khususnya kesadaran untuk menimbang balita di Posyandu.
3. Kurangnya peningkatan kapasitas kader.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas Kesehatan (standar pelayanan sesuai dengan standar 10T).

Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dapat dilihat pada table 2.5 berikut.

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung	66.052.472.000,00	64.913.326.000,00	62.854.310.000,00	66.999.474.876,00	74.475.453.682,75	56.748.540.554,00	56.459.027.950,00	59.050.322.289,00	62.203.279.164,00	70.135.370.745,00	85.91	86.98	93.95	92.84	94.17	0.03	0.05
Belanja Pegawai	66.052.472.000,00	64.913.326.000,00	62.854.310.000,00	66.999.474.876,00	63.405.453.682,75	56.748.540.554,00	56.459.027.950,00	59.050.322.289,00	62.203.279.164,00	60.565.370.745,00	85.91	86.98	93.95	92.84	95.52	(0.01)	0.02
Belanja Subsidi																	
Belanja Hibah																	
Belanja Bantuan Sosial																	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa																	
Belanja Tidak Terduga					11.070.000.000,00					9.570.000.000,00							
Belanja Langsung	134.807.317.770,00	145.731.400.892,00	130.357.665.922,00	140.333.792.876,35	186.099.919.005,84	112.406.733.390,57	117.715.233.324,22	103.308.671.219,54	115.854.088.459,13	150.886.170.986,67	83.38	80.78	79.25	82.56	81.08	0.08	0.08
Belanja Pegawai	12.298.938.150,00	10.220.003.550,00	10.217.677.300,00	10.333.950.000,00	8.991.210.000,00	10.583.346.600,00	8.707.249.900,00	7.536.771.500,00	9.706.984.300,00	7.025.336.050,00	86.05	85.20	73.76	93.93	78.14	(0.08)	(0.10)
Belanja Barang dan Jasa	84.162.761.884,00	85.658.230.652,00	97.067.392.007,00	103.147.674.731,35	128.795.495.073,91	68.306.790.254,57	70.201.815.337,65	80.611.803.039,41	82.208.338.861,53	99.396322.137,65	81.16	81.96	83.05	79.70	77.17	0.11	0.10
Belanja Modal	38.345.617.736,00	49.853.166.690,00	23.072.596.615,00	26.852.168.145,00	48.313.213.931,93	33.516.596.736,00	38.806.168.086,57	15.160.096.680,13	23.938.765.297,60	44.464.512.799,02	87.41	77.84	65.71	89.15	92.03	0.06	0.07

Berdasarkan table 2.5 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi dapat dikategorikan baik. Tingkat rasio rata-rata 86,09. Hal ini menandakan perencanaan berlangsung cukup baik.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat ditemukan beberapa tantangan dan peluang bagi Dinas Kesehatan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan yang ada antara lain:

1. Sebagian masyarakat Kabupaten Berau yang tinggal di kawasan pedesaan, daerah pesisir, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.
3. Peredaran NAPZA yang semakin meningkat.
4. Gaya hidup yang tidak sehat meningkat.

Sementara itu, peluangnya antara lain:

1. Dukungan Pemerintah pada sektor kesehatan semakin besar.
2. Teknologi dan inovasi bidang kesehatan yang semakin berkembang.
3. Perkembangan transportasi, komunikasi dan peyebarluasan berbagai informasi.
4. Tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin tinggi.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam table 3.1.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Status kesehatan Ibu, Bayi dan Balita yang masih rendah	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	<p>Masih kurangnya keterampilan tenaga dokter dan bidan dalam penanganan kasus gawat darurat (<i>Invertio Uteri</i>) serta kurang maksimalnya tenaga bidan dalam menangani persalinan.</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas Kesehatan (standar pelayanan sesuai dengan standar 10T).</p> <p>Tidak semua Praktek swasta (Dokter praktek, Bidan praktek dan Klinik swasta yang menangani kehamilan dan persalinan) mengirim/memberikan Laporannya ke Puskesmas.</p>
		Angka Kematian Bayi IMR	<p>Masih kurangnya keterampilan bidan dan dokter dalam Resusitasi dan Penanganan Bayi Dengan BBLR.</p>
			<p>Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas petugas program Anak di Puskesmas</p> <p>Rendahnya pemberian cakupan pelayanan kesehatan pada Bayi Baru Lahir sesuai standar.</p> <p>Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada Bayi dan Balita yang sesuai standar terutama indikator penimbangan 8 kali per tahun yang tidak terpenuhi.</p>
		Angka Kematian Anak balita	<p>Masih ada perawat dan Bidan Desa yang belum terlatih tatalaksana Balita sakit dengan pendekatan MTBS</p> <p>Masih ada Bidan Desa yang belum terlatih Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak</p> <p>Faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita adalah gizi, sanitasi, penyakit infeksi serta perlunya penerapan pola pendekatan MTBS bagi puskesmas yang belum melaksanakan.</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Beban penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masih tinggi	Persentase BBLR	<p>Anemia atau kurang darah ibu hamil adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Sementara itu, dalam sel darah merah terdapat hemoglobin (Hb). Keadaan ini menyebabkan janin kekurangan makanan dan oksigen sehingga akan mengalami gangguan pertumbuhan yang berdampak lahir dengan BBLR.</p> <p>Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Apabila status gizi buruk, baik sebelum kehamilan maupun selama kehamilan akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan pada janin, menyebabkan terhambatnya pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir mudah infeksi, abortus dan sebagainya sehingga memiliki risiko melahirkan bayi dengan BBLR.</p> <p>Usia ibu hamil berpengaruh terhadap kejadian BBLR, karena jika melahirkan di usia kurang dari 20 tahun terjadi persaingan nutrisi antara ibu dan janin dimana di usia tersebut seorang wanita masih dalam masa pertumbuhan yang juga akan membutuhkan asupan gizi yang besar untuk memenuhi masa pertumbuhannya.</p> <p>Jarak kehamilan adalah selisih waktu antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan selanjutnya. Jarak kehamilan yang terlalu dekat perlu diwaspadai karena fungsi alat reproduksi tidak berfungsi secara optimal sehingga memungkinkan pertumbuhan janin kurang baik</p>
		Persentase Prevalensi balita kurang gizi	<p>Ketersediaan tenaga gizi belum memenuhi kebutuhan kabupaten secara umum, rata-rata puskesmas hanya memiliki 1 orang TPG.</p> <p>Pengelolaan program gizi masyarakat oleh TPG yang masih lemah.</p> <p>Masih kurangnya kompetensi TPG dalam melaksanakan proses asuhan gizi puskesmas.</p> <p>Masih lemahnya kemampuan TPG dalam mengembangkan PMT berbasis bahan pangan local.</p> <p>Masih adanya Posyandu yang tidak aktif terutama masa pandemi dimana untuk wilayah perkotaan posyandu banyak yang dinonaktifkan sehingga cakupan kegiatan Posyandu banyak yang tidak berjalan sesuai program terutama balita ditimbang (D/S) hasilnya rendah yaitu 26,06 %, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 60%, juga hasil kegiatan yang lain yang tidak mencapai target.</p>
		Deteksi dini penyakit tidak menular masih rendah	Masih banyak masyarakat yang belum memahami deteksi dini PTM

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka Kesakitan Malaria masih tinggi	Banyak Kasus yang lambat terdeteksi karena Lokasi yang jauh,
			Masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah dekat hutan dan berkunjung ke hutan belum memiliki kesadaran untuk memakai Alat Pelindung Diri dari gigitan nyamuk malaria
			Kurangnya dana untuk melakukan massal blood survey atau penemuan kasus secara dini dengan melakukan screning malaria diwilayah endemis malaria.
		Angka Kesakitan ( <i>Incidence Rate</i> ) Demam Berdarah Dengue.	Kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap Survey Jentik demikian juga kurang maksimalnya Survey Jentik
			Tidak adanya tindak lanjut dari hasil survey jentik sehingga walaupun ditemukan banyak jentik jika tidak dibasmi maka tetap akan berkembang.
			Tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan fogging sehingga sebagian petugas fogging melaksanakan tidak sesuai dengan SOP (banyaknya permintaan masyarakat untuk dilakukan fogging).
		Angka Penemuan Pasien Tuberkulosis BTA Positif Baru.	Ada sebagian pasien mangkir untuk berobat
			Tidak melaksanakan investigasi kontak dan deteksi dini karena adanya pandemi covid 19
			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri yang terkait dengan penyakit TBC (Pasif Case Finding).
			Menurunnya kunjungan masyarakat yang terduga TBC kefasyankes selama pandemi covid.
		Kasus HIV/Aids.	Logistik untuk pemeriksaan tidak mencukupi untuk sasaran HIV dan Kurangnya tenaga terlatih di puskesmas
			Kurang anggaran untuk deteksi dini dan survei HIV, Deteksi dini HIV dan Survei kontak belum maksimal
			Sebagian penderita HIV pendatang (PSK) Sistem kontrak
		PHBS masih rendah	Desa / Kelurahan Siaga aktif Adanya permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 yaitu adanya pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia bahkan dunia, sehingga kegiatan pembinaan tidak dapat berjalan maksimal karena adanya peraturan pemerintah dan kabupaten tentang pembatasan atau larangan kegiatan yang menumpulkan banyak orang dalam rangka pencegahan penularan Covid 19
			Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang ditampilkan melalui aplikasi PIS-PK Kemenkes, menunjukkan angka 0,16%, yang berarti Kabupaten Berau sebagai Kabupaten dengan keluarga

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			TIDAK SEHAT
		Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu	Capaian kunjungannya masih rendah di karenakan masyarakat masih kurang antusias dalam kunjungan ke Posbindu, ditambah dengan permasalahan adanya Pandemi Covid-19 sudah setahun ini yang mengakibatkan kunjungan ke Posbindu menurun dan kebanyakan yang kunjung ke Posbindu usia 45 tahun keatas.
3	Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Masih ada Puskesmas yang belum memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Permenkes 75 Tahun 2014	a. Terbatasnya sarpras di tingkat puskesmas, terbatasnya SDM. b. Sering terjadi mutasi petugas yang sudah terlatih, ketersediaan jaringan internet, adanya aplikasi baru perlu penyesuaian.
		Belum meratanya akses dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan.	Keterbatasan akses pelayanan antara lain disebabkan karena kendala geografis sulit diakses, biaya tinggi, budaya masyarakat, SDM kesehatan dan keterbatasan sarana transportasi
		Belum semua puskesmas terakreditasi sesuai dengan roadmap	a. Puskesmas belum sempat di survey karena belum selesai pelaksanaannya dan pada tahun berikutnya belum mendapatkan jadwal dari komisi akreditasi FKTP b. Masih ada puskesmas yang belum memenuhi standar akreditasi c. Tenaga kesehatan di Puskesmas belum semuanya memahami konsep akreditasi. e. Puskesmas belum siap untuk dilakukan survey oleh Komisi Akreditasi.
4	Penyebaran tenaga kesehatan belum merata	Produksi tenaga kesehatan dari perguruan tinggi kesehatan/Poltekkes tidak terserap/masih banyak pengangguran. Kekurangan tenaga kesehatan di Faskes terpencil dan sangat terpencil	Formasi CPNS terbatas  Rata rata tenaga kesehatan maunya bertugas di daerah perkotaan

### 3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2021-2026

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 Tahun 2021 adalah:

**“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”**

Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Dinas Kesehatan memiliki fokus pencapaian pada misi ke 1 dan ke 3. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau disajikan dalam table 3.1 berikut.

Tabel 3. 1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MISI 1 Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.Masih banyaknya tenaga Kesehatan yang belum terlatih 2.Kompetensi Tenaga Kesehatan perlu ditingkatkan 3.Masih Kurangnya tenaga Kesehatan sesuai jenjang pendidikan	1.Kurang optimalnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 2. Adanya mutasi/pindah petugas yang tidak terkoordinasi dengan baik 3.Kurangnya kuota formasi CPNS	1.Penegakkan aturan disiplin pegawai 2.Adanya Dukungan Propinsi dalam peningkatan kapasitas SDM 3.Adanya Regulasi tentang Rencana Kebutuhan Tenaga yang sesuai standar
2	MISI 3 Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;			

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Adanya Sarana prasarana Kesehatan yang belum memenuhi Standar sesuai permenkes No. 43 Tahun 2019. 2. Kondisi Geografis	1. Belum adanya juknis tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan 2. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis	1. Adanya penetapan Standar Pelayanan Minimum dari Pemerintah Pusat 2. Adanya dukungan pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana 3. Adanya pemerataan sesuai standar kebutuhan

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SERTA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Telaahan telah dilakukan pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan

#### Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan Pada tahun 2020-2024 yaitu:

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan	1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Persentase bumil KEK dari 17,3% menjadi 10% 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 95% 3. Jumlah kabupaten/kota yang

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	siklus hidup		<p>menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Persentase balita <i>stunting</i> dari 27,7% menjadi 14%</li> <li>5. Persentase bayi, kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%</li> <li>6. Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif dari 51% menjadi 100%</li> <li>7. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%</li> <li>8. 100% kabupaten/kota menerapkan kebijakan KTR (Jumlah 514)</li> <li>9. kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota</li> </ol>
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas</li> <li>2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000 sebesar 100%</li> <li>3. Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%</li> <li>4. Persentase RS terakreditasi sebesar 100%</li> <li>5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain</li> </ol>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan Pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024</li> <li>2. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024</li> <li>3. Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota</li> <li>4. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 %</li> <li>5. Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota</li> <li>6. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%</li> </ol>
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu dan alat kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 96%
		5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%</li> <li>2. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (<i>minimal 4 spesialis dasar wajib ada</i>) sebesar 90%</li> <li>3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang</li> <li>4. Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%</li> </ol>
		6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan	7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100%</li> </ol>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	inovatif	pemerintahan yang baik dan bersih	<p>2. Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100%</p> <p>3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58</p> <p>4. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95</p> <p>5. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)</p>
		8. Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Litbangkes dan sistem informasi Kesehatan untuk pengambilan keputusan	<p>1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi</p> <p>2. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data</p>

Sementara itu Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019-2023 adalah “ Meningkatkan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”. Untuk Mewujud tujuan tersebut maka ditetapkan beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak dengan 3 indikator sasaran yaitu :
  - a. Jumlah Kematian Ibu
  - b. Jumlah Kematian Bayi
  - c. Persentase Balita Stunting
2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar dengan 1 indikator sasaran yaitu “ Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi”
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak Menular dengan 4 indikator sasaran yaitu :
  - a. Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)
  - b. Jumlah Temuan Kasus TBC / Case Detection Rate (CDR)
  - c. Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

- d. Persentase Penderita DM mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

### **Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Berikut adalah lima strategi Pembangunan Kesehatan :

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi

Mencakup:

- 1) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
- 2) Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
- 3) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil
- 4) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi

remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda

Mencakup:

- 1) Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- 2) Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- 3) Percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- 4) Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
- 5) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*);
- 6) Penguatan sistem surveilans gizi;
- 7) Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- 8) Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

- c. Peningkatan pengendalian penyakit

Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, *stroke*, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut. Mencakup:

- 1) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real time*, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
- 2) Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
- 3) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera
- 4) Pengendalian resistensi antimikroba;
- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

- d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Mencakup:

- 1) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,

Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

- 2) Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
- 3) Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
- 4) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
- 5) Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

e. Penguatan Sistem Kesehatan

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Difokuskan pada:

- a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
- b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
- c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
- d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
- f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
- g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
- h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta

dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*;

- i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying* dan *sailing health care*) dan gugus pulau;
  - j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;
  - k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 2) ) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Difokus kan pada:
- A) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
  - b). Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
  - c). Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
  - d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
  - e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
  - f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
  - g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
  - h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.

- 3) Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan Difokuskan pada:
  - a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
  - b) Penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik;
  - c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
  - d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*;
  - e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
- 4) Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian Kesehatan Difokuskan pada:
  - a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
  - c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*;
  - d) Penguatan data rutin;
  - e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk *big data*, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
  - f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
  - g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;

- h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
  - i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.
- 5) Penguatan pelaksanaan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan *active purchasing* termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme *cost-sharing*, penguatan *Health Technology Assessment* (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

**a. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW dan KLHS Kabupaten Berau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Berau. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka telaahan terkait permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin beserta faktor penghambat dan factor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut :

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  
berdasarkan tata ruang wilayah dan KLHS beserta factor Penghambat  
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS dan RTRW Dengan Tupoksi Dinas	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemenuhan Sarana prasarana untuk pembangunan Gedung pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan	Adanya Gedung pelayanan Kesehatan dasar yang belum sesuai standar bangunan Kementrian Kesehatan	Belum adanya Juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan	Adanya Kebijakan Pusat terkait Pembangunan berwawasan lingkungan
2	Peningkatan sarana pembuangan air limbah	Tidak semua sarana pelayanan Kesehatan mempunyai sarana pembuangan air limbah	Kurangnya kompetensi sumber daya	Komitmen yang tinggi untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan
3	Peningkatan sarana air bersih dan jamban keluarga	Masih adanya perilaku masyarakat yang buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup Bersih dan Sehat	Komitmen STOP BABS
4	Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit	Masih adanya kasus penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan iklim/	Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup Bersih	Komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan

berbasis cuaca missal : dan Sehat  
 lingkungan Diare, DBD,  
 yang berkaitan ISPA dll  
 dengan  
 iklim/cuaca

Dengan adanya telaahan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka perlu mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Berau dalam pengembangan pelayanan kesehatan selanjutnya agar dapat berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Berau yang optimal.

**b. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya antara lain Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2021 yang masih ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab masalah pokok pada Dinas Kesehatan Kab.Berau, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Kesehatan Kab Berau adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2. Isu-isu Strategis**

No.	ISU STRATEGIS
1	Munculnya penyakit Infeksi baru hampir semuanya bersifat zoonosis dan berkaitan dengan lalu lintas hewan, manusai dan Komoditas (Covid-19)
2	Kurangnya Kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Laboratorium Surveilans) baik dari sisi kuantitas dan Kualitas (Sarpras, Kompetensi SDM, dan Kemampuan uji)
3	Masih Kurangnya Sanitasi di Masyarakat ( Stop buang air besar sembarangan )
4	Tidak Semua Limbah Medis di Fasyankes tertangani dengan baik
5	Perlunya Peningkatan Cakupan dan tingkatan Akreditasi Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas
6	Masih kurangnya Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar
7	Masih tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan balita
8	Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
9	Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
10	Masih Kurangnya Sarana, Prasarana dan mutu pelayanan kesehatan yang Sesuai standar
11	Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata

No.	ISU STRATEGIS
12	Penyalahgunaan Napza
13	Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai yang diharapkan
14	Koordinasi dan integrasi lintas program dan lintas sektor masih kurang optimal
15	Belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
16	Puskemas yang telah dilatih PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) belum sepenuhnya berfungsi secara optimal disebabkan mobilitas tenaga Kesehatan tinggi terutama tenaga dokter yang merupakan TIM PONED (dokter, perawat, bidan) pada umumnya adalah tenaga Non PNS
17	Perubahan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat yang beresiko menyebabkan timbulnya penyakit
18	Adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender dan tingkat sosial
19	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam pembangunan kesehatan
20	Kinerja, disiplin, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih perlu untuk diperkuat

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dijabarkan dalam table 4.1 berikut.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Usia harapan hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	Jumlah kematian Ibu Melahirkan (kasus)	10	10	8	8	7	7
				Angka Kematian Bayi (IMR) (/1000 klh)	22	21	20	19	18	18
				Angka kematian anak balita (/1000 klh)	16	16	16	15	15	15
				Persentase balita gizi kurang (%)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
				Persentasedeseda/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	60	80	90	95	98	100
				Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	70	73	76	80	82	85
				Persentase IRTP yang dilakukan pengawasan memenuhi syarat	60	65	70	75	80	85
				Cakupan rumah tangga sehat ( PHBS Rumah tangga)	35	45	50	55	55	55
			Meningkatnya kuantitas dan	Persentase tenaga kesehatan yang	100	100	100	100	100	100

	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	kualitas sumber daya kesehatan	mengikuti pelatihan						
			Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin	80	85	87	90	100	100
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase desa/ kelurahan yang mencapai UCI	83	87	91	95	95	95
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (%)	100	100	100	100	100	100
			Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	Persentase Sarana Kesehatan terakreditasi	85	87	90	95	100	100
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100

## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	SRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur</b>	Meningkatnya Kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	1	Menambah Formasi CPNS tenaga Kesehatan	1	Pemenuhan kebutuhan dan distribusi tenaga kesehatan dan tenaga lainnya sesuai standar
					2	Pengelolaan Sistem Informasi SDM
			2	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
					4	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
					5	Menyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			3	Persentase tenaga Kesehatan yang memiliki ijin	6	Peningkatan pelatihan dan Uji kompetensi tenaga kesehatan
					7	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
		2. Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan	4	Menurunkan AKI	8	Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan Anak Remaja
					9	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Dokter dan Bidan DiFasilitas Kesehatan
					10	Melengkapi Sarana dan

		masyarakat, dan kesehatan lingkungan			Prasarana di Fasyankes agar sesuai Standar
	5	Menurunkan AKB		11	Optimalisasi pelayanan Kesehatan ibu dan anak, usia produktif
				12	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Dokter dan Bidan Di Fasilitas Kesehatan
				13	Melengkapi Sarana dan Prasarana di Fasyankes agar sesuai Standar
	7	Menurunkan Persentase BBLR		14	Optimalisasi pelayanan Kesehatan ibu dan anak, usia produktif
				15	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Dokter, Bidan dan Tenaga Gizi Di Fasilitas Kesehatan
				16	Peningkatan promosi kesehatan
				17	Optimalisasi Pelayanan Gizi
	8	Menurunkan Persentase balita gizi kurang		18	Optimalisasi pelayanan Kesehatan ibu dan anak, usia produktif
				19	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Dokter dan Bidan, tenaga gizi Di Fasilitas Kesehatan
				20	Melengkapi Sarana dan Prasarana di Fasyankes agar sesuai Standar
				21	Peningkatan promosi kesehatan

				<b>22</b>	Optimalisasi Pelayanan Gizi
			9	Meningkatkan Persentase Desa Siaga Aktif	<b>23</b> Optimalisasi Desa Siaga Aktif
			10	Meningkatkan Persentase Desa/ Kelurahan STBM	<b>24</b> Optimalisasi Desa/ Kelurahan STBM
			11	Meningkatkan kualitas Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi dasar	<b>25</b> Optimalisasi pelayanan kesehatan lingkungan ( pengelolaan Limbah Cair, Padat, Gas dan Udara, Zat kimia dan limbah B3 termasuk limbah medis, Pengeloaan Air, Permukiman, Tempat- Tempat Umum, Tempat Pengolahan Makan dan Minumam, Industri rumah
					<b>26</b> Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit menular berbasis lingkungan
					<b>27</b> Peningkatan Pelayanan Klinik Sanitasi
			12	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Kerja & Kesehatan Olah Raga	<b>28</b> Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Kerja dan Pengendalian lingkungan kerja
					<b>29</b> Optimalisasi Pencegahan Penyakiit Akibat Kerja
					<b>30</b> Peningkatan Pembinaan Kesehatan Olahraga

						masyarakat
		3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	13	Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI	31	Optimalisasi Desa/kelurahan yang mencapai UCI
			14	Meningkatkan Upaya Kewaspadaan Dini Terhadap Kejadian Luar Biasa/ Wabah	32	Respon Terhadap Sinyal Kewaspadaan Dini
					33	Pengelolaan Spesimen Yang Akurat
					34	Penguatan Penyelidikan Epidemiologi
			15	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki posbindu PTM	35	Optimalisasi Desa/kelurahan yang melaksanakan Posbindu
			16	Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	36	Optimalisasi keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus
			17	Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	37	Optimalisasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang kesehatan
					38	Optimalisasi Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat (UKBM)
<b>Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan</b>		4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	18	Jumlah FKTP sesuai standar Permenkes 43 tahun 2019.	39	Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
					40	Pembangunan dan pengembangan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan, UPTD Dinas , RS Pratama )
					41	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan berbasis IT

				<b>42</b>	FKTP terakreditasi
				<b>43</b>	RS terakreditasi
		19	Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat	<b>44</b>	Optimalisasi pendataan masyarakat miskin
				<b>45</b>	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan
				<b>46</b>	Utilisasi peserta JKN di Puskesmas

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. LATAR BELAKANG**

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penganggung		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkannya Kualitas dan jangkauan layanan kesehatan			<b>DINAS KESEHATAN</b>				230.905.907.500,00		306.158.797.000,00		323.829.680.200,00		628.202.067.130,00		351.665.966.049,50		370.349.524.606,93		2.093.765.524.886,43			
		01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Proses/prosedur pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	90		77.428.155.000		86.600.313.000		92.220.780.000		95.993.770.000		99.837.908.000		104.062.255.000				556.143.181.000	
			01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	13	15		15		15		15		15		15			90		
			01 2.01 1	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	4	4	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	19	420.000.000,00
			01 2.01 2	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00
			01 2.01 3	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00
			01 2.01 4	Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00
			01 2.01 5	Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00
			01 2.01 6	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	3	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	130.000.000,00	3	140.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	18	750.000.000,00
			01 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen)	2	4	100.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	5	450.000.000,00	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	5	550.000.000,00	29	2.350.000.000,00
			01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
			01 2.02 1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	14	65.723.170.000,00	14	69.009.328.000,00	14	72.459.795.000,00	14	76.082.785.000,00	14	79.886.923.000,00	14	83.881.270.000,00	14	88.121.270.000,00	84	447.043.271.000,00
			01 2.02 2	Pengadaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya jasa Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas ASN (Org)	60	70	2.800.000.000,00	75	3.000.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	19.000.000.000,00
			01 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (orang)	48	48	380.985.000,00	48	420.985.000,00	48	460.985.000,00	48	500.985.000,00	49	540.985.000,00	50	580.985.000,00	50	580.985.000,00	50	2.885.910.000,00
			01 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (kali)	0	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	16	135.000.000,00
			01 2.02 5	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	12	85.000.000,00
			01 2.02 6	Pengelolaan dan Penghapusan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan (dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	12	60.000.000,00
			01 2.02 7	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (dokumen)	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	18	90.000.000,00
			01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																		
			01 2.03 1	Pengusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	144	90.000.000,00
			01 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	5.000.000,00	2	100.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	6	300.000.000,00	6	300.000.000,00	22	1.005.000.000,00
			01 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya koordinasi/penilaian/evaluasi Barang Milik Daerah SKPD dengan baik	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	12	180.000.000,00
			01 2.03 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (kali)	7	7	60.000.000,00	9	85.000.000,00	9	90.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	110.000.000,00	9	110.000.000,00	52	545.000.000,00
			01 2.03 5	Rekonsiliasi dan Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	7	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	42	75.000.000,00
			01 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan baik (kali)	0	1	60.000.000,00	1	85.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	6	435.000.000,00
			01 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	37	60.000.000,00
		01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>																			
		01 2.04 3	Penguluhan dan Penyelesaian Kebijakan Retribusi Daerah	Terpenulhinya informasi retribusi Daerah (kali)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00	
		01 2.04 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (kali)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00	

Menindaklanjuti

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung				
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan		01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedia Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi (dokumen)	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	72	60.000.000,00			
		01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
		01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedia pakaian dinas beserta atribut sesuai peraturan yang berlaku (Stel)	0	0	250	175.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00	250	175.000.000,00	300	210.000.000,00	1800	1.260.000.000,00				
		01.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah fasyankes yang mendapatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (fasyankes)	0	23	100.000.000,00	23	175.000.000,00	23	200.000.000,00	23	225.000.000,00	23	275.000.000,00	23	300.000.000,00	23	300.000.000,00	23	1.275.000.000,00			
		01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku (kali)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	60	600.000.000,00			
		01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kab)	5	5	250.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	55	2.750.000.000,00			
		01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
		01.2.06.1	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	6	7	10.000.000,00	10	15.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	145.000.000,00			
		01.2.06.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pekerjaan (Jenis)	8	10	1.500.000.000,00	15	1.700.000.000,00	20	2.000.000.000,00	15	1.700.000.000,00	15	1.700.000.000,00	15	1.700.000.000,00	15	1.700.000.000,00	20	10.300.000.000,00			
		01.2.06.4	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia pengadaan bahan logistik kantor (Jenis)	2	8	25.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	275.000.000,00			
		01.2.06.5	Pengadaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedia Barang Cetak dan pengandaan kantor (Jenis)	4	6	120.000.000,00	8	170.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	1.090.000.000,00			
		01.2.06.6	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan (Buah)	2	4	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	29	85.000.000,00			
		01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia makan dan minum Tamu (Kali)	50	50	30.000.000,00	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	550	390.000.000,00			
		01.2.06.9	Pengenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah (Kali)	50	250	225.000.000,00	300	300.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	1950	1.925.000.000,00			
		01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
		01.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	0	6	1.800.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	26	7.800.000.000,00			
		01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia kendaraan operasional atau lapangan untuk menunjang pelayanan ke masyarakat (unit)	15	18	2.500.000.000,00	10	4.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	76	26.500.000.000,00			
		01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedia Mebelair kantor dan alat penyimpanan (Jenis)	5	7	600.000.000,00	8	900.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	5.500.000.000,00			
		01.2.08	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
		01.2.08.1	Pengadaan Jasa Surat Mengurut	Tersedia jasa surat mengurut dan pengiriman dokumen (Lembar)	200	500	12.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	3000	87.000.000,00			
		01.2.08.2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	250.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	72	2.000.000.000,00			
				Jumlah Sarana kesehatan yang dilakukan penambungan listrik, tambah daya dan pemasangan air (Paket)	20	25	400.000.000,00	30	550.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	175	3.350.000.000,00			
		01.2.08.4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia jasa tenaga pelayanan administrasi umum kantor (Org)	8	11	350.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	2.600.000.000,00			
		01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
		01.2.09.2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia jasa, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	460	500	1.200.000.000,00	510	1.400.000.000,00	520	1.600.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	9.450.000.000,00			
		01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan kerja dinas kesehatan yang di perbaiki (Jenis)	4	12	112.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	315.000.000,00	15	320.000.000,00	15	320.000.000,00	15	320.000.000,00	15	1.497.000.000,00			
		01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (M2)	1	3	75.000.000,00	12	120.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	63	795.000.000,00			
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																				
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																						

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peringkat Daerah Penanggung	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				151.631.503.500,00		215.360.064.000,00		228.710.217.200,00		528.776.436.680,00		247.935.231.032,00		261.991.487.286,80		1.518.943.522.098,80		
				Persentase balita gizi kurang	7,3	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,58	22	20	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8	10	10	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	
				Angka kematian anak balita	15	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Balita (%)																	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Bayi baru lahir (%)																	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (%)																	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)																	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)																	
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%)																	
				Persentase desakelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30	60	80	90	95	95	95	95	95	95	98	100	100	100	100	100	
				Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60	67	70	75	80	80	80	80	80	80	83	85	85	85	85	85	85
				Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Cakupan Desakelurahan (%)																	
				Universal Child Immunization (UCI)	59	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
				Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
				presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase pelayanan kesehatan ODGJ dan napa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,30	93,6	94,1	94,6	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
				Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79	85	87	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan penanganan penderita pengakit TBSC BTA (%)	214	815	860	860	886	886	886	886	886	886	886	905	905	905	905	905	905
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	54	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita pengakit DBD	84%	49%	48%	47%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
				Angka kejadian Malaria		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,02%	0,19%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
		2 201	Pengediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Daerah dan Standar	31																
		2 201 1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianga RS Kelas D (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	325.000.000.000,00	0	0	0	0	0	1	325.000.000.000,00
		2 201 2	Pembangunan Puskesmas	Tersedianga Puskesmas dan Pustu sesuai Standar (sarana)	11	8	2.942.082.000,00	8	21.500.000.000,00	8	21.500.000.000,00	7	15.000.000.000,00	7	18.500.000.000,00	7	20.000.000.000,00	45	80.442.082.000,00	45	80.442.082.000,00
		2 201 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianga Bangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (unit)				1	2.200.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	5	17.200.000.000,00	5	17.200.000.000,00
		2 201 4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianga Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (unit)		5	2.500.000.000,00	4	4.384.725.000,00	3	4.820.000.000,00	3	5.305.000.000,00	3	5.836.000.000,00	3	6.419.000.000,00	21	22.845.725.000,00	21	22.845.725.000,00
		2 201 5	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianga Gedung Ruang RS yang Representatif (unit)	0	1	800.000.000,00	2	400.000.000,00	1	2.000.000.000,00	2	4.000.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	8	7.650.000.000,00	8	7.650.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perang kat Daerah Penang gung	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan		2 201 6	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Fasilitas Penunjang Puskesmas (unit)		9	7.163.371.000,00	12	7.528.323.000,00	10	8.000.000.000,00	10	8.800.000.000,00	10	9.600.000.000,00	10	10.400.000.000,00	61	41.091.700.000,00		
		2 201 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya fasilitas penunjang kesehatan lainnya (unit)					2	2.000.000.000,00	3	2.500.000.000,00	3	2.700.000.000,00	3	3.000.000.000,00	11	7.200.000.000,00			
		2 201 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedia dan terpeliharanya gedung RS yang baik dan terstandar (unit)	1	0	-	0	-	2	400.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	4	600.000.000,00		
		2 201 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedia dan terpeliharanya fasilitas penunjang Puskesmas (unit)	6	3	1.400.000.000,00	3	1.491.163.000,00	2	13.000.000.000,00	2	13.500.000.000,00	2	13.700.000.000,00	2	14.000.000.000,00	14	56.541.163.000,00		
		2 201 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya Fasilitas Kesehatan Lainnya (unit)				2	2.054.151.000,00	2	600.000.000,00	2	800.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.200.000.000,00	10	4.454.151.000,00		
		2 201 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedia dan terpeliharanya rumah dinas yang baik dan terstandar (unit)	3	4	1.300.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	24	4.500.000.000,00		
		2 201 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Fasilitas Kesehatan yang cukup dan terstandar (unit)	0	6	400.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	36	1.200.000.000,00		
		2 201 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang cukup dan terstandar (unit)	0	6	500.000.000,00	10	750.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	28	1.700.000.000,00		
		2 201 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes dengan peralatan yang memenuhi standar (sarana)	12	15	5.637.782.000,00	16	7.337.340.000,00	17	3.305.000.000,00	18	110.000.000,00	20	11.660.000.000,00	21	14.000.000.000,00	21	34.110.122.000,00		
		2 201 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Vaksin yang diadakan (jenis)	270	200	4.320.527.000,00	200	5.905.000.000,00	200	7.100.000.000,00	200	8.500.000.000,00	200	10.200.000.000,00	200	12.245.000.000,00	200	36.625.527.000,00		
		2 201 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BM/HP dan Reagen yang diadakan (jenis)	230	230	3.682.542.000,00	230	4.500.000.000,00	230	5.300.000.000,00	230	6.400.000.000,00	230	7.600.000.000,00	230	9.200.000.000,00	230	27.482.542.000,00		
		2 201 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana dan Pendukung Fasyankes sesuai standar	6	0	0	6	200.000.000,00	8	300.000.000,00	7	250.000.000,00	6	200.000.000,00	8	300.000.000,00	35	950.000.000,00		
		2 201 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melakukan Pemeliharaan dan kalibrasi (sarana)	20	22	200.000.000,00	22	300.000.000,00	22	350.000.000,00	22	400.000.000,00	22	450.000.000,00	22	500.000.000,00	22	1.700.000.000,00		
		2 202	Pengediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stunting	18,1	26,5		26,5		26,5		26,5		25		25		25			
					Jumlah Kematian Ibu	8	10		10		9		8		8		7		7		
					Angka Kematian Bayi	22,58	22		20		19		18		18		18		18		
					Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI (Desa)	59	110		110		110		110		110		110		110		
		2. Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan		2 202 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (orang)	4779	4640	1.581.882.000,00	5500	1.898.259.000,00	5600	2.277.910.000,00	5700	2.733.492.000,00	5800	3.280.191.000,00	6000	3.936.223.000,00	6000	11.771.734.000,00
					Pertemuan bulin, bulin, bayi baru lahir	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)															
				2 202 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (orang)	422	422	1.331.882.000,00	550	1.598.259.000,00	600	1.917.910.000,00	650	2.301.493.000,00	700	2.761.791.000,00	750	3.314.150.000,00	3.672	9.911.335.000,00
	AMP			Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (unit)																	
	Jampersal			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar/ jampersal (orang)																	
2 202 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	300.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	823.440.000,00	13.824	2.447.200.000,00		
	pertemuan mtbm			Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)																	
2 202 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	200.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	823.440.000,00	13.824	2.347.200.000,00		
				Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (unit)																	
2 202 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	14.735	35.458	200.000.000,00	36.458	500.000.000,00	37.458	600.000.000,00	38.458	720.000.000,00	38.458	864.000.000,00	111.210	1.036.800.000,00	111.210	2.894.000.000,00		
2 202 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	0	159.282,00	75.000.000,00	160.875,00	110.000.000,00	162.484,00	150.000.000,00	164.109,00	200.000.000,00	165.750,00	225.000.000,00	167.407,00	250.000.000,00	167.407,00	760.000.000,00				

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perang kat Daerah Penang gung	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
3. Meningkatkan penecegan dan pengendalian penyakit	2	202 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6473	12.771,00	250.000.000	12.871,00	350.000.000	12.871,00	600.000.000	13.000,00	700.000.000	13.100,00	800.000.000	13.100,00	248.832.000,00	13.100,00	2.700.000.000,00		
		202 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	262	256	132.050.000,00	253	150.000.000,00	251	175.000.000,00	248	200.000.000,00	246	220.000.000,00	243	48.315.300,00	243	325.385.300		
		202 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terduga TB yang ditemukan dan dicabuti (orang)	1021	4401	35.000.000,00	4644	50.000.000,00	4644	45.000.000,00	4784	60.000.000,00	4784	65.000.000,00	4887	60.000.000,00	4887	315.000.000		
		202 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6232	6543	20.000.000,00	6870	35.000.000,00	7213	50.000.000,00	7573	60.000.000,00	7951	65.000.000,00	8348	45.000.000,00	8348	275.000.000		
2. Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	2	202 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kependudukan Luar Biasa (KLEB)	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kependudukan luar biasa (KLEB) (Kabupaten)	0	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	10.500.000.000		
		202 14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana di daerah berpotensi bencana	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit akibat stres dan kekerasan (Kesi)	0	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	114.000.000.000		
		202 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bumil-balita remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar (orang)	925	925	805.000.000,00	1025	966.000.000,00	1125	1.062.600.000,00	1225	1.168.860.000,00	1325	1.285.746.000,00	1425	1.414.320.600,00				
					Jumlah puskesmas yang mampu menangani gizi buruk (unit)																
					Jumlah bumil keK/balita gizi buruk/balita kurus yang mendapatkan pmt (orang)																
		202 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos UKP/PSPI/Agro/Industri/Kebudayaan	36/7/23/150	36/7/23/200	683.966.700	40/10/23/300	826.166.000	45/15/23/400	485.050.000	45/15/23/400	582.060.000	45/15/23/500	638.470.000	50/15/23/600	638.164.000	50/15/23/600	4.113.836.700		
		202 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Peneceban dan Pempangan Kelelele Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) (Klub/lelele, lempangan/lempangan Air, Minum)	544/67/100	544/67/100	1.870.748.800,00	600/75/110	2.104.768.000,00	644/88/120	2.420.483.200,00	680/95/125	2.783.555.680,00	700/110/125	3.201.089.032,00	700/110/125	3.661.252.366,80	720/110/125	16.061.837.039		
					Jumlah Dukuman, Partisan, Partidewagan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas (IPAL, TPS, dan UKL-UKL/ODPH) (dok)	1	6		8		2		3		3		5		27		
		202 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah perluasan informasi kesehatan melalui berbagai media komunikasi (jenis)	7	5	175.000.000,00	7	400.000.000,00	9	650.000.000,00	9	775.000.000,00	9	875.000.000,00	9	1.025.000.000,00	9	3.900.000.000		
		202 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya (puskesmas)	1	12	100.000.000,00	14	400.000.000,00	16	400.000.000,00	18	400.000.000,00	20	400.000.000,00	21	400.000.000,00	21	2.100.000.000		
3. Meningkatkan penecegan dan pengendalian penyakit	2	202 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelidkan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLEB/wabah (kali)	7	35	200.000.000,00	45	220.000.000,00	50	250.000.000,00	55	280.000.000,00	60	300.000.000,00	65	320.000.000,00	65	1.570.000.000		
		202 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah ODMK yang mendapat pelayanan kesehatan (orang)		50	50.000.000,00	55	60.000.000,00	60	65.000.000,00	65	70.000.000,00	70	75.000.000,00	75	80.000.000,00	315	400.000.000		
		202 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan (orang)	Jumlah Penderita Jiwa dan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan (orang)		75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	575	600.000.000		
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang	2	202 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Spesialis, melalui kunjungan Dokter Spesialis (orang)	902	152	436.000.000,00	990	523.200.000,00	1065	627.840.000,00	1065	627840000	1065	627840000	1065	627840000	5402	3.470.560.000		
		202 25	Pelayanan Kesehatan Pengakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penemuan kusta kasus baru tanpa cacat (kasus)	12	11	15.000.000,00	13	110.000.000,00	15	150.000.000,00	17	170.000.000,00	19	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	895.000.000		
3. Meningkatkan penecegan dan pengendalian penyakit				Jumlah orang rasmin yang urakan pemeriksaan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil	4779	4640	15.000.000,00	5500	110.000.000,00	5600	150.000.000,00	5700	170.000.000,00	5800	200.000.000,00	6000	250.000.000,00	6000	895.000.000		
				Jumlah Kesakitan DED	201	123	350.000.000,00	125	375.000.000,00	127	400.000.000,00	129	425.000.000,00	131	450.000.000,00	133	475.000.000,00	133	2.475.000.000		
				Jumlah kesakitan malaria	115	90	15.000.000,00	120	200.000.000,00	150	220.000.000,00	180	250.000.000,00	210	275.000.000,00	230	300.000.000,00	230	1.260.000.000		
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatakana diare sesuai standar (puskesmas)	4	21	70.000.000,00	21	90.000.000,00	21	110.000.000,00	21	130.000.000,00	21	150.000.000,00	21	170.000.000,00	21	720.000.000		

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI (Desa)	59	110	200.000.000,00	110	200.000.000,00	110	220.000.000,00	110	220.000.000,00	110	250.000.000,00	110	250.000.000,00	110	1.030.000.000		
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan	2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhi Jumlah Penduduk yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) melalui PBI Daerah (orang)	4.875	10270	4.327.744.000,00	20000	10.163.615.000,00	23108	11.587.424.000,00	34622	16.631.136.000,00	51933	24.946.704.000,00	51933	24.946.704.000,00	51.933	93.203.327.000
	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit	2	202	27	Deteksi Dini Penggunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah yang dilakukan Deteksi Dini Penggunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (orang)	0	50	100.000.000,00	1000	250.000.000,00	1200	300.000.000,00	1440	350.000.000,00	1728	400.000.000,00	2074	450.000.000,00	7492	1.850.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Pengikat Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Sampel Pengikat Berpotensi KLB (kali)	10	10	60.000.000,00	13	70.000.000,00	15	80.000.000,00	17	90.000.000,00	20	100.000.000,00	25	110.000.000,00	25	510.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kab sehat (kec)	13	13	250.000.000,00	13	300.000.000,00	13	350.000.000,00	13	400.000.000,00	13	450.000.000,00	13	500.000.000,00	13	2.250.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhi Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan Telemedicine (unit)	0	0	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	6	400.000.000,00	6	1.000.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	1	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	104.000.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	21	21	43.000.000.000,00	21	45.000.000.000,00	21	50.000.000.000,00	21	55.000.000.000,00	21	60.000.000.000,00	21	65.000.000.000,00	21	318.000.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	2	2	2.000.000.000,00	2	2.200.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.800.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	3.200.000.000,00	2	15.700.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Yang Telah Tersertifikasi (fasyankes)	17	18	1.899.906.000,00	22	11.770.000.000,00	22	7.500.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	12.320.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	52.489.906.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Konfirmasi dan tindak lanjut kasus KIPi (kasus)	0	20	20.000.000,00	20	35.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	255.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini Yang di Respon (kali)	60	30	200.000.000,00	40	220.000.000,00	45	240.000.000,00	50	260.000.000,00	55	280.000.000,00	60	200.000.000,00	60	1.400.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Pelayanan SPGDT	1	1	100.000.000,00	1	388.083.000,00	1	500.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	4.588.083.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan tepat waktu															
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan SIK Puskesmas (Dokumen)	21	21	150.000.000,00	21	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	300.000.000,00	21	350.000.000,00	21	400.000.000,00	21	1.650.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	203	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan (puskesmas)	10	10	100.000.000,00	15	120.000.000,00	20	150.000.000,00	20	160.000.000,00	21	175.000.000,00	21	200.000.000,00	21	905.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Perangkat SIK (Fasyankes)	10	10	350.000.000,00	15	1.000.000.000,00	20	1.200.000.000,00	20	1.300.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	6.850.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai standar dan regulasi	47	62	150.000.000,00	67	200.000.000,00	72	225.000.000,00	78	275.000.000,00	83	300.000.000,00	88	325.000.000,00	88	1.475.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	204	2	Peningkatan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Tersedianya RS dan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi persyaratan dan Klasifikasi	0	0	0	2		3		3		3		3		3	
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan peningkatan mutu pelayanan	0	0	0	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	330.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	2	204	4	Pengiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Dokumen SOP, dan Dokumen Peraturan Internal RS	0	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0	0	0	1	200.000.000
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.825.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>655.000.000,00</b>
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3	202		Pencapaian, Kebutuhan dan Penguasaan Sumbardaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusi di Wilayah Kabupaten/Kota																
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3	202	1	Pencapaian dan Distribusi serta Pemertan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Predistribusi tenaga kesehatan ke fasyankes (kali)	0	0	0	5	25.000.000,00	7	35.000.000,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	41	205.000.000,00
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3	202	3	Pembinaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas yang tenaga kesehatannya di monitoring dan di evaluasi (orang)	18	21	15.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	450.000.000,00
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pembudayaan masyarakatan	3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan (orang)	5	5	50.000.000,00	150	1.500.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	555	5.550.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Peringkat Daerah Penanggung
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) yang memiliki uji kompetensi jabatan fungsional (orang)	30	30	-	0	-	30	105.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0	0
				Jumlah Pengelola sarana pelayanan kefarmasian mengikuti Bimtek (orang)	80	80	50.000.000,00	80	60.000.000,00	80	72.000.000,00	80	86.400.000,00	80	103.680.000,00	80	124.416.000,00	80	496.496.000,00	496.496.000,00
				Jumlah Pegawai yang mengikuti sertifikasi (orang)	0	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	80.000.000,00	5	90.000.000,00	5	100.000.000,00	5	455.000.000,00	455.000.000,00
				Jumlah petugas yang dilatih aplikasi SISDMK dan REBUT	0	0	0	50	100.000.000,00	50	120.000.000,00	50	144.000.000,00	50	172.800.000,00	50	207.360.000,00	50	744.160.000,00	744.160.000,00
				Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100	100	20.449.000,00	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	230.449.000,00	230.449.000,00
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00	600.800.000,00	73	743.420.000,00	76	933.683.000,00	80	1.191.860.450,00	82	1.547.827.017,50	85	2.045.782.320,13	85,00	7.063.372.787,63	7.063.372.787,63
				Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00	200.000.000,00	65	250.000.000,00	70	300.000.000,00	75	350.000.000,00	80	400.000.000,00	85	450.000.000,00	85,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00
		4	201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
		4	201	2 Penyelesaian dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian yang di Awasi (sanganfar)	40	40	20.449.000,00	40	25.000.000,00	45	35.000.000,00	50	40.000.000,00	55	50.000.000,00	65	60.000.000,00	65	230.449.000,00
		4	203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi oleh Industri Rumah Tangga															
		4	203	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	351	75	115.428.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	450	865.428.000
				Jumlah Pabrik Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penilaian Keamanan Pangan (PKP)	351	150		150		150		150		150		150		300		
				Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi	1	1		1		1		1		1		1		6		
		4	204	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	Jumlah TPM (restoran, Jasa boga, Rumah Makan) dan DAM yang Memenuhi Syarat	380	400	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3310	3.346.185.287,6
		4	204	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM siap uji dan DAM yang Memenuhi Syarat	502	487	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3337	3.346.185.287,63
				Jumlah Pengawasan, pemberian TPM Siap Uji dan DAM yang memenuhi syarat	680	635		710		725		735		745		755		4365		
				Jumlah Pengelola TPM Yang memiliki sertifikat kelas laik Higien Sanitasi	502	137		110		55		55		55		55		467		
		4	205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stikerisasi TPM makanan jajanan	30	110	150.000.000	210	225.000.000	346	337.500.000	518	506.250.000	726	759.375.000	730	1.139.062.500	2640	3.117.167.500
		4	205	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM Jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar	211	215	150.000.000	226	225.000.000	232	337.500.000	260	506.250.000	280	759.375.000	293	1.139.062.500	1506	3.117.167.500
				Jumlah TPM Jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi	406	406		410		415		420		430		450		2531		
				Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan	1	1		1		1		1		1		1		6		
		4	206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP Yang dilakukan Pengawasan Post Market dan ditindaklanjuti	75	170	200.000.000	182	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
		4	206	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pengawasan Post market IRTP	75	170	200.000.000	182	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
				Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP	10	20		30		40		50		60		70		270		
				Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana (dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		6		
		5		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)</b>	<b>3,8</b>	<b>35</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>45</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.730.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.770.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.615.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>8.780.000.000,00</b>

TUJUAN	SASARAN	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		5 201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	5 201 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jenis)	1	1	400.000.000,00	5	675.000.000,00	5	725.000.000,00	5	910.000.000,00	5	930.000.000,00	5	765.000.000,00	5	4.405.000.000,00		
		5 202	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
		5 202 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaraan 5 Tatapan Germas dan survei PHBS (sarana)	2	0	0	21	150.000.000,00	21	175.000.000,00	21	185.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	910.000.000,00
				Jumlah Keamatan Yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% Intervensi Keluarga (kec)	1	3	240.000.000,00	5	255.000.000,00	7	270.000.000,00	9	285.000.000,00	11	290.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	1.640.000.000,00
		5 203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	5 203 1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kali)	1	2	150.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	1.825.000.000,00

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Berau Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun						Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah kematian Ibu Melahirkan (kasus)	8	10	10	8	8	7	7	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) (/1000 klh)	22,58	22	21	20	19	18	18	
3	Angka kematian anak balita (/1000 klh)	15	16	16	16	15	15	15	
4	Persentase balita gizi kurang (%)	7,3	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
5	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	60	60	80	90	95	98	100	
6	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	59	70	73	76	80	82	85	
7	Persentase IRTTP yang dilakukan pengawasan memenuhi syarat	9	60	65	70	75	80	85	
8	Cakupan rumah tangga sehat ( PHBS Rumah tangga)	33,33	35	45	50	55	55	55	
9	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	83	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	83	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase desa/ kelurahan yang mencapai UCI	19,50	83	87	91	95	95	95	
12	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (%)	80	100	100	100	100	100	100	
13	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB	90	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun						Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	Persentase Sarana Kesehatan terakreditasi	79	85	87	90	95	100	100	
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		100	100	100	100	100	100	

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kategori Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>				231.446.757.500,00		306.874.647.000,00		324.749.680.200,00		629.332.067.130,00		352.980.966.049,50		371.849.524.606,93		2.098.387.224.886,43		
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	90		77.428.155.000		86.600.313.000		92.220.780.000		95.993.770.000		99.837.908.000		104.062.255.000		556.143.181.000		
01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	13	15		15		15		15		15		15		90		
01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	4	4	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	19	420.000.000,00
01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00
01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00
01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00
01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00
01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	3	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	130.000.000,00	3	140.000.000,00	3	150.000.000,00	18	750.000.000,00
01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen)	2	4	100.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	5	450.000.000,00	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	29	2.350.000.000,00
01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	14	65.723.170.000,00	14	69.099.328.000,00	14	72.459.795.000,00	14	76.082.785.000,00	14	79.886.923.000,00	14	83.881.270.000,00	84	447.043.271.000,00
01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Org)	60	70	2.800.000.000,00	75	3.000.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	19.000.000.000,00
01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (orang)	48	48	380.985.000,00	48	420.985.000,00	48	460.985.000,00	48	500.985.000,00	49	540.985.000,00	50	580.985.000,00	50	2.885.910.000,00
01	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (kali)	0	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00	16	135.000.000,00
01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	12	85.000.000,00
01	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan (dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	12	60.000.000,00
01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (dokumen)	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	18	90.000.000,00
01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																	
01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	144	90.000.000,00
01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	5.000.000,00	2	100.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	6	300.000.000,00	22	1.005.000.000,00
01	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan baik (kali)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	12	180.000.000,00
01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (kali)	7	7	60.000.000,00	9	85.000.000,00	9	90.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	110.000.000,00	52	545.000.000,00
01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	7	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	42	75.000.000,00
01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan baik (kali)	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	6	435.000.000,00
01	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00	37	60.000.000,00
01	2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>																	
01	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terpenuhiya Informasi retribusi Daerah (kali)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00
01	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (kali)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00
01	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi (dokumen)	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	72	60.000.000,00
01	2.05	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>																	
01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut sesuai peraturan yang berlaku (lot)	0	0		250	175.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00	250	175.000.000,00	300	210.000.000,00	1800	1.260.000.000,00
01	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah fasyankes yang mendapatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan (fasyankes)	0	23	100.000.000,00	23	175.000.000,00	23	200.000.000,00	23	225.000.000,00	23	275.000.000,00	23	300.000.000,00	23	1.275.000.000,00
01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peraturan perundang-undangan sesuai aturan yang berlaku (kali)		10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	60	600.000.000,00





2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	300.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.447.200.000,00
			pertemuan mtbm	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)															
2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	200.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.347.200.000,00
				Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (unit)															
2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	14.735	35.458	200.000.000,00	36.458	500.000.000,00	37.458	600.000.000,00	38.458	720.000.000,00	38.458	864.000.000,00	111.210	1.036.800.000,00	111.210	2.884.000.000,00
2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	0	159.282	215.850.000,00	#####	215.850.000,00	162.484,00	300.000.000,00	164.109,00	400.000.000,00	165.750,00	450.000.000,00	167.407,00	500.000.000,00	167.407,00	1.581.700.000,00
2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6.473	12.771	250.000.000	12.871,00	350.000.000	12.871,00	600.000.000	13.000,00	700.000.000	13.100,00	800.000.000	13.100,00	248.832.000,00	13.100,00	2.700.000.000,00
2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)		58.456	50.000.000	61.398,00	100.000.000	64.467,00	150.000.000	67.691,00	200.000.000	71.075,00	250.000.000	74.629,00	300.000.000	397.716,00	750.000.000
2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)		3.998	50.000.000	4.199,00	100.000.000	4.408,00	150.000.000	4.628,00	200.000.000	4.859,00	250.000.000	5.101,00	300.000.000	27.193,00	750.000.000
2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	262	256	132.050.000,00	253	150.000.000,00	251	175.000.000,00	248	200.000.000,00	246	220.000.000,00	243	48.315.300,00	243	925.365.300
2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terduga TB yang ditemukan dan diobati (orang)	1021	4401	35.000.000,00	4644	50.000.000,00	4644	45.000.000,00	4784	60.000.000,00	4784	65.000.000,00	4887	60.000.000,00	4887	315.000.000
2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6232	6543	20.000.000,00	6870	35.000.000,00	7213	50.000.000,00	7573	60.000.000,00	7951	65.000.000,00	8348	45.000.000,00	8348	275.000.000
2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) (kegiatan)	0	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	10.500.000.000
2	202	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit akibat virus dan/atau bakteri (kec)	0	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	114.000.000.000
2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bumil/balita/ remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar (orang)	925	925	805.000.000,00	1025	966.000.000,00	1125	1.062.600.000,00	1225	1.168.860.000,00	1325	1.285.746.000,00	5625	1.414.320.600,00		
				Jumlah puskesmas yang mampu menangani gizi buruk (unit)															
				Jumlah bumil/keg/ balita gizi buruk/ balita kurus yang mendapatkan pmt (orang)															
2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos UNK/GP2SP/Fasyankes/Kebugaran	36/7/23/15	36/7/23/200	689.986.700	40/10/23/300	826.166.000	45/15/23/400	485.050.000	45/15/23/400	582.060.000	45/15/23/500	698.470.000	50/15/23/500	838.164.000	50/15/23/600	4.119.896.700
2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) /Kelurahan,kampung/Sarana Air Minum	544 TFU/33 Kamp/80 SAM	544/67/100	1.870.748.800,00	600/75/110	2.104.768.000,00	644/88/120	2.420.483.200,00	680/95/125	2.783.555.680,00	700/100/125	3.201.089.032,00	700/110/125	3.681.252.386,80	720/110/125	16.061.897.099
				Jumlah Dokumen Perizinan Lingkungan dan Pengelolaan	1	6		8		2		3		3		5		27	
2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media (komunitas) (jenis)	7	5	175.000.000,00	7	400.000.000,00	9	650.000.000,00	9	775.000.000,00	9	875.000.000,00	9	1.025.000.000,00	9	3.900.000.000
2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya (puskesmas)	1	12	100.000.000,00	14	400.000.000,00	16	400.000.000,00	18	400.000.000,00	20	400.000.000,00	21	400.000.000,00	21	2.100.000.000
2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB/Wabah (kali)	7	35	200.000.000,00	45	220.000.000,00	50	250.000.000,00	55	280.000.000,00	60	300.000.000,00	65	320.000.000,00	65	1.570.000.000
2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (GDMK)	Jumlah ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		50	50.000.000,00	55	60.000.000,00	60	65.000.000,00	65	70.000.000,00	70	75.000.000,00	75	80.000.000,00	375	400.000.000
2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penderita Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	575	600.000.000
2	202	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Spesialis, melalui kunjungan Dokter Spesialis (orang)	902	152	436.000.000,00	990	523.200.000,00	1065	627.840.000,00	1065	627840000	1065	627840000	1065	627840000	5402	3.470.560.000
2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penemuan kusta kasus baru tanpa obat (kasus)	12	11	15.000.000,00	13	110.000.000,00	15	150.000.000,00	17	170.000.000,00	19	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	895.000.000
				Jumlah ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil (orang)	4779	4640	15.000.000,00	5500	110.000.000,00	5600	150.000.000,00	5700	170.000.000,00	5800	200.000.000,00	6000	250.000.000,00	6000	895.000.000
				Jumlah kesakitan DBD	201	123	350.000.000,00	125	375.000.000,00	127	400.000.000,00	129	425.000.000,00	131	450.000.000,00	133	475.000.000,00	133	2.475.000.000
				Jumlah kesakitan malaria	115	90	15.000.000,00	120	200.000.000,00	150	220.000.000,00	180	250.000.000,00	210	275.000.000,00	230	300.000.000,00	230	1.260.000.000
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan tata laksana diren sesuai standar (puskesmas)	4	21	70.000.000,00	21	90.000.000,00	21	110.000.000,00	21	130.000.000,00	21	150.000.000,00	21	170.000.000,00	21	720.000.000
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI (Desa)	59	110	200.000.000,00	110	200.000.000,00	110	220.000.000,00	110	220.000.000,00	110	250.000.000,00	110	250.000.000,00	110	1.090.000.000

2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhiya Jumlah Penduduk yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) melalui FBI Daerah (orang)	4,875	10270	4.927.744.000,00	20000	10.163.615.000,00	23108	11.587.424.000,00	34622	16.631.136.000,00	51933	24.946.704.000,00	51933	24.946.704.000,00	51,933	93.203.327.000
				Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)	15720	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	42.600.000.000
2	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (orang)	0	50	100.000.000,00	1000	250.000.000,00	1200	300.000.000,00	1440	350.000.000,00	1728	400.000.000,00	2074	450.000.000,00	7492	1.850.000.000
2	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Sampel Penyakit Berpotensi KLB (kali)	10	10	60.000.000,00	13	70.000.000,00	15	80.000.000,00	17	90.000.000,00	20	100.000.000,00	25	110.000.000,00	25	510.000.000
2	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan lab sehat (kec)	13	13	250.000.000,00	13	300.000.000,00	13	350.000.000,00	13	400.000.000,00	13	450.000.000,00	13	500.000.000,00	13	2.250.000.000
2	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhiya Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan Telemedicine (unit)	0	0	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	6	400.000.000,00	6	1.000.000.000
2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	1	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	104.000.000.000
2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	21	21	43.000.000.000,00	21	45.000.000.000,00	21	50.000.000.000,00	21	55.000.000.000,00	21	60.000.000.000,00	21	65.000.000.000,00	21	318.000.000.000
2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	2	2	2.000.000.000,00	2	2.200.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.800.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	3.200.000.000,00	2	15.700.000.000
2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Yang Telah Tersertifikasi (fasyankes)	17	18	1.899.906.000,00	22	11.770.000.000,00	22	7.500.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	12.320.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	52.489.906.000
2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Konfirmasi dan tindak lanjut kasus KPI (kasus)	0	20	20.000.000,00	20	35.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	255.000.000
2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini Yang di Respon (kali)	60	30	200.000.000,00	40	220.000.000,00	45	240.000.000,00	50	260.000.000,00	55	280.000.000,00	60	200.000.000,00	60	1.400.000.000
2	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Pelayanan SPGDT	1	1	100.000.000,00	1	388.083.000,00	1	500.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	4.588.083.000
2	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan tepat waktu															
2	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan SIK Puskesmas (Dokumen)	21	21	150.000.000,00	21	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	300.000.000,00	21	350.000.000,00	21	400.000.000,00	21	1.650.000.000
2	203	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan (puskesmas)	10	10	100.000.000,00	15	120.000.000,00	20	150.000.000,00	20	160.000.000,00	21	175.000.000,00	21	200.000.000,00	21	905.000.000
2	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Perangkat SIK (Fasyankes)	10	10	350.000.000,00	15	1.000.000.000,00	20	1.200.000.000,00	20	1.300.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	6.850.000.000
2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
2	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai standar dan regulasi	47	62	150.000.000,00	67	200.000.000,00	72	225.000.000,00	78	275.000.000,00	83	300.000.000,00	88	325.000.000,00	88	1.475.000.000
2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya RS dan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi	0	0	0	2		3		3		3		3		3	-
2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan peningkatan mutu pelayanan	0	0	0	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	330.000.000
2	204	4	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Dokumen SOP, dan Dokumen Peraturan Internal RS	0	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0	0	0	1	200.000.000
3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.825.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>655.000.000</b>
3	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan URM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota																
3	202	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pendistribusian tenaga kesehatan ke fasyankes (kali)	0	0	0	5	25.000.000,00	7	35.000.000,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	41	205.000.000
3	202	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas yang tenaga kesehatannya di monitoring dan di evaluasi (sarana)	18	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	75.000.000,00	21	450.000.000
3	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan (orang)	5	5	50.000.000,00	150	1.500.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	555	5.550.000.000
				Jumlah tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional (orang)	30	30	-	0	-	30	105.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0
				Jumlah Pengelola sarana pelayanan kefarmasian mengikuti Bimtek (orang)	80	80	50.000.000,00	80	60.000.000,00	80	72.000.000,00	80	86.400.000,00	80	103.680.000,00	80	124.416.000,00	80	496.496.000
				Jumlah Pegawai yang mengikuti sertifikasi (orang)	0	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	80.000.000,00	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00	30	455.000.000
				Jumlah petugas yang dilatih aplikasi SISO/MS dan RENCUT	0	0	0	50	100.000.000,00	50	120.000.000,00	50	144.000.000,00	50	172.800.000,00	50	207.360.000,00	50	744.160.000
4			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Cakupan Sarana Pelayanan kefarmasian yang sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20.449.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>230.449.000</b>
				persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	65,65	70,00	600.800.000,00	73	743.420.000,00	78	833.683.000,00	80	1.191.860.450,00	82	1.547.827.717,50	85	2.045.782.320,13	85,00	7.063.372.787,63
				Persentase RTP yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00	200.000.000,00	65	250.000.000,00	70	300.000.000,00	75	350.000.000,00	80	400.000.000,00	85	450.000.000,00	85,00	1.950.000.000
4	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
4	201	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian yang di Awasi (saryanfar)	40	40	20.449.000,00	40	25.000.000,00	45	35.000.000,00	50	40.000.000,00	55	50.000.000,00	65	60.000.000,00	65	230.449.000

4	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi oleh Industri Rumah Tangga															
4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindakan Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	351	75	115.428.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	450	865.428.000		
				Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penuluhan Keamanan Pangan (PKP)	351	150		150		150		150		150		900			
				Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi	1	1		1		1		1		1		6			
4	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM (restoran, jasa boga, Rumah Makan) dan DAM yang Memenuhi Syarat	380	400	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3310	3.946.185.287,6
4	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM siap saji dan DAM yang Memenuhi Syarat	502	487	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3397	3.946.185.287,63
				Jumlah Pengawasan, pembinaan TPM Siap Saji dan DAM yang memenuhi syarat	680	695		710		725		735		745		755		4365	
				Jumlah Pengelola TPM yang memiliki sertifikat kursus laik higienitas	502	137		110		55		55		55		55		467	
4	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stikerisasi TPM makanan jajanan	30	110	150.000.000	210	225.000.000	346	337.500.000	518	506.250.000	726	759.375.000	730	1.139.062.500	2640	3.117.187.500
4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindakan Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar	211	215	150.000.000	226	225.000.000	232	337.500.000	260	506.250.000	280	759.375.000	293	1.139.062.500	1506	3.117.187.500
				Jumlah TPM jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi	406	406		410		415		420		430		450		2531	
				Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan	1	1		1		1		1		1		1		6	
4	206		Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang dilakukan Pengawasan Post Market dan ditindaklanjuti	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan	Jumlah Pengawasan Post market IRTP	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
				Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP	10	20		30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	270	-
				Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana (dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		6	
5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)</b>	<b>3,8</b>	<b>35</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>45</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.730.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.770.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.615.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>8.780.000.000,00</b>
5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jenis)	1	1	400.000.000,00	5	675.000.000,00	5	725.000.000,00	5	910.000.000,00	5	930.000.000,00	5	765.000.000,00	5	4.405.000.000,00
5	202		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaraan 5 Tatanan Germas dan survey PHBS (sarana)	2	0	0	21	150.000.000,00	21	175.000.000,00	21	185.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	910.000.000,00
				Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% Intervensi Keluarga (kec)	1	3	240.000.000,00	5	255.000.000,00	7	270.000.000,00	9	285.000.000,00	11	290.000.000,00	13	300.000.000,00	13	1.640.000.000,00
5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
5	203	1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kali)	1	2	150.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	1.825.000.000,00

## **BAB VIII PENUTUP**

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Renstra diperlukan:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan

Tanjung Redeb, September 2021

Tim Penyusun

# DAFTAR GAMBAR

# DAFTAR TABEL





kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	2	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedia dan terpeliharanya Fasilitas Kesehatan Lainnya (unit)				2	2.054.151.000,00	2	600.000.000,00	2	800.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.200.000.000,00	10	4.454.151.000,00	
	2	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedia dan terpeliharanya rumah dinas yang baik dan standar (unit)	3	4	1.300.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	24	4.500.000.000,00	
	2	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Kebutuhan Sarana Fasilitas Kesehatan yang cukup dan terstandar (unit)	0	6	400.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	36	1.200.000.000,00	
	2	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang cukup dan terstandar (unit)	0	6	500.000.000,00	10	750.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	28	1.700.000.000,00	
	2	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes dengan peralatan yang memenuhi standar	12	15	5.697.782.000,00	16	7.337.340.000,00	17	9.305.000.000,00	18	110.000.000,00	20	11.660.000.000,00	21	14.000.000.000,00	21	34.110.122.000,00	
	2	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat, Vaksin yang diadakan (jenis)	270	200	4.920.527.000,00	200	5.905.000.000,00	200	7.100.000.000,00	200	8.500.000.000,00	200	10.200.000.000,00	200	12.245.000.000,00	200	36.625.527.000,00	
	2	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BMHP dan Reagen yang diadakan (jenis)	230	230	3.682.542.000,00	230	4.500.000.000,00	230	5.300.000.000,00	230	6.400.000.000,00	230	7.600.000.000,00	230	9.200.000.000,00	230	27.482.542.000,00	
	2	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana dan Pendukung Fasyankes sesuai standar	6	0	0	6	200.000.000,00	8	300.000.000,00	7	250.000.000,00	6	200.000.000,00	8	300.000.000,00	35	950.000.000,00	
	2	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melakukan Pemeliharaan dan kalibrasi (sarana)	20	22	200.000.000,00	22	300.000.000,00	22	350.000.000,00	22	400.000.000,00	22	450.000.000,00	22	500.000.000,00	22	1.700.000.000,00	
	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stunting	18,1	26,5		26,5		26,5		26,5		25		25		25		
					Jumlah Kematian Ibu	8	10		10		9		8		8		7		7		
					Angka Kematian Bayi	22,58	22		20		19		18		18		18		18		
					Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI (Desa)	59	110		110		110		110		110		110		110		
	2. Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	2	202	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (orang)	4779	4640	1.581.882.000,00	5500	1.898.259.000,00	5800	2.277.910.000,00	5700	2.733.492.000,00	5800	3.280.191.000,00	6000	3.936.229.000,00	6000	11.771.734.000,00
					Pertemuan bumil, bulin, bayi baru lahir	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)															
		2	202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (orang)	422	422	1.331.882.000,00	550	1.598.259.000,00	600	1.917.910.000,00	650	2.301.493.000,00	700	2.761.791.000,00	750	3.314.150.000,00	3.672	9.911.335.000,00
					AMP	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (unit)															
					Jampersal	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar/ jampersal (orang)															
		2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	300.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.447.200.000,00
					pertemuan mtbm	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)															
2		202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	200.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.347.200.000,00	
					Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (unit)																
2		202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	14.735	35.458	200.000.000,00	36.458	500.000.000,00	37.458	600.000.000,00	38.458	720.000.000,00	38.458	864.000.000,00	111.210	1.036.800.000,00	111.210	2.884.000.000,00	
2		202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	0	159.282,00	75.000.000,00	160.875,00	110.000.000,00	162.484,00	150.000.000,00	164.109,00	200.000.000,00	165.750,00	225.000.000,00	167.407,00	250.000.000,00	167.407,00	760.000.000,00	
2		202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6.473	12.771,00	250.000.000,00	12.871,00	350.000.000,00	12.871,00	600.000.000,00	13.000,00	700.000.000,00	13.100,00	800.000.000,00	13.100,00	248.832.000,00	13.100,00	2.700.000.000,00	
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit	2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	262	256	132.050.000,00	253	150.000.000,00	251	175.000.000,00	248	200.000.000,00	246	220.000.000,00	243	48.315.300,00	243	925.365.300	
	2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terdugaTB yang ditemukan dan diobati (orang)	1021	4401	35.000.000,00	4644	50.000.000,00	4644	45.000.000,00	4784	60.000.000,00	4784	65.000.000,00	4887	60.000.000,00	4887	315.000.000	
	2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6232	6543	20.000.000,00	6870	35.000.000,00	7213	50.000.000,00	7573	60.000.000,00	7951	65.000.000,00	8348	45.000.000,00	8348	275.000.000	
	2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) (kabupaten)	0	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	10.500.000.000	
2	202	14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit akibat virus dan vektorsasi (Kec)	0	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	114.000.000.000		
2. Meningkatkan kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bumil/balita/ remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar (orang)	925	925	805.000.000,00	1025	966.000.000,00	1125	1.062.600.000,00	1225	1.168.860.000,00	1325	1.285.746.000,00	5625	1.414.320.600,00			
					Jumlah puskesmas yang mampu menangani gizi buruk (unit)																
					Jumlah bumil ke/ balita gizi buruk/ balita kurus yang mendapatkan pmt (orang)																
	2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos JKK/GP2SP/Fasyankes/Kebudayaan	36/7/23/150	36/7/23/200	689.986.700	40/10/23/300	826.166.000	45/15/23/400	485.050.000	45/15/23/400	582.060.000	45/15/23/500	698.470.000	50/15/23/600	838.164.000	50/15/23/600	4.119.896.700	
	2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) /Kelurahan/kampung/Sarana Air Minum	544 TFU/33 Kamp/80 SAM	544/67/100	1.870.748.800,00	600/75/110	2.104.768.000,00	644/88/120	2.420.483.200,00	680/95/125	2.783.555.680,00	700/100/125	3.201.089.032,00	700/110/125	3.681.252.386,80	720/110/125	16.061.897.099	
					Jumlah Dokumen Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas (IPAL, TPS, dan UKL-UPL/DPLH) (dok)	1	6		8		2		3		5		27				
2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai media komunikasi (jenis)	7	5	175.000.000,00	7	400.000.000,00	9	650.000.000,00	9	775.000.000,00	9	875.000.000,00	9	1.025.000.000,00	9	3.900.000.000		
2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya (puskesmas)	1	12	100.000.000,00	14	400.000.000,00	16	400.000.000,00	18	400.000.000,00	20	400.000.000,00	21	400.000.000,00	21	2.100.000.000		
				Jumlah																	
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit	2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB/Wabah (kai)	7	35	200.000.000,00	45	220.000.000,00	50	250.000.000,00	55	280.000.000,00	60	300.000.000,00	65	320.000.000,00	65	1.570.000.000	
	2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		50	50.000.000,00	55	60.000.000,00	60	65.000.000,00	65	70.000.000,00	70	75.000.000,00	75	80.000.000,00	375	400.000.000	
	2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penderita Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	575	600.000.000	



4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	351	75	115.428.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	450	865.428.000			
					Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keagamaan Pangan (PKP)	351	150		150		150		150		150		900				
					Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi	1	1		1		1		1		1		6				
	4	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM (restoran, Jasa boga, Rumah Makan ) dan DAM yang Memenuhi Syarat	380	400	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3310	3.946.185.287,6	
	4	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM siap saji dan DAM yang Memenuhi Syarat	502	487	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3397	3.946.185.287,63	
					Jumlah Pengawasan, pembinaan TPM Siap Saji dan DAM yang memenuhi syarat	680	695		710		725		735		745		755		4365		
					Jumlah Pengelola TPM Yang memiliki sertifikat kursus laik Higiene Sanitasi	502	137		110		55		55		55		55		467		
	4	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stikerisasi TPM makanan jajanan	30	110	150.000.000	210	225.000.000	346	337.500.000	518	506.250.000	726	759.375.000	730	1.139.062.500	2640	3.117.187.500	
	4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM Jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar	211	215	150.000.000	226	225.000.000	232	337.500.000	260	506.250.000	280	759.375.000	293	1.139.062.500	1506	3.117.187.500	
					Jumlah TPM Jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi	406	406		410		415		420		430		450		2531		
				Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan	1	1		1		1		1		1		1		6			
4	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP Yang dilakukan Pengawasan Post Market dan tindak lanjut	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000		
4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pengawasan Post market IRTP	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000		
				Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP	10	20		30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	270	-		
				Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana (dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		6			
	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)</b>	<b>3,8</b>	<b>35</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>45</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.730.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.770.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.615.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>8.780.000.000,00</b>	
	5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jenis)	1	1	400.000.000,00	5	675.000.000,00	5	725.000.000,00	5	910.000.000,00	5	930.000.000,00	5	765.000.000,00	5	4.405.000.000,00	
	5	202		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
	5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaraan 5 Tatanan Germas dan survey PHBS (sarana)	2	0	0	21	150.000.000,00	21	175.000.000,00	21	185.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	910.000.000,00	
				Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% Intervensi Keluarga (kec)	1	3	240.000.000,00	5	255.000.000,00	7	270.000.000,00	9	285.000.000,00	11	290.000.000,00	13	300.000.000,00	13	1.640.000.000,00		
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
	5	203	1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kali)	1	2	150.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	1.825.000.000,00	

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>DINAS KESEHATAN</b>				231.446.757.500,00		306.874.647.000,00		324.749.680.200,00		629.332.067.130,00		352.980.966.049,50		371.849.524.606,93		2.098.387.224.886,43	
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik</b>	90		77.428.155.000		86.600.313.000		92.220.780.000		95.993.770.000		99.837.908.000		104.062.255.000		556.143.181.000	
01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	13	15		15		15		15		15		15		90		
01	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	19	420.000.000,00	
01	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00	
01	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	6	420.000.000,00	
01	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00	
01	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	6	120.000.000,00	
01	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	130.000.000,00	3	140.000.000,00	3	150.000.000,00	18	750.000.000,00	
01	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4	100.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	5	450.000.000,00	5	500.000.000,00	5	550.000.000,00	29	2.350.000.000,00	
01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
01	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	65.723.170.000,00	14	69.009.328.000,00	14	72.459.795.000,00	14	76.082.785.000,00	14	79.886.923.000,00	14	83.881.270.000,00	84	447.043.271.000,00	
01	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	70	2.800.000.000,00	75	3.000.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	3.300.000.000,00	75	19.000.000.000,00	
01	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	48	380.985.000,00	48	420.985.000,00	48	460.985.000,00	48	500.985.000,00	49	540.985.000,00	50	580.985.000,00	50	2.885.910.000,00	
01	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	4	30.000.000,00	4	35.000.000,00	16	135.000.000,00	
01	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	12	85.000.000,00	
01	2.02	6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	12	60.000.000,00	
01	2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	18	90.000.000,00	
01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																
01	2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	24	15.000.000,00	144	90.000.000,00	
01	2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	2	5.000.000,00	2	100.000.000,00	3	150.000.000,00	4	200.000.000,00	5	250.000.000,00	6	300.000.000,00	22	1.005.000.000,00	
01	2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	12	180.000.000,00	
01	2.03	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7	7	60.000.000,00	9	85.000.000,00	9	90.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	110.000.000,00	52	545.000.000,00	
01	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	42	75.000.000,00	
01	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	6	435.000.000,00	
01	2.03	7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00	37	60.000.000,00	
01	2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>																
01	2.04	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00	
01	2.04	4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	10	60.000.000,00	
01	2.04	7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	72	60.000.000,00	
01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																
01	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0		250	175.000.000,00	500	350.000.000,00	500	350.000.000,00	250	175.000.000,00	300	210.000.000,00	1800	1.260.000.000,00	
01	2.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	23	100.000.000,00	23	175.000.000,00	23	200.000.000,00	23	225.000.000,00	23	275.000.000,00	23	300.000.000,00	23	1.275.000.000,00	
01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	60	600.000.000,00	

01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kali)		5	250.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	55	2.750.000.000,00	
<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)	6	7	10.000.000,00	10	15.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	145.000.000,00	
01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang pekerjaan (jenis)	8	10	1.500.000.000,00	15	1.700.000.000,00	20	2.000.000.000,00	15	1.700.000.000,00	15	1.700.000.000,00	20	10.300.000.000,00	
01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor (jenis)	2	8	25.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	275.000.000,00	
01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan kantor (jenis)	4	6	120.000.000,00	8	170.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	1.090.000.000,00	
01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan (Buah)	2	4	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	29	85.000.000,00	
01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum Tamu (kali)	50	50	30.000.000,00	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	550	390.000.000,00	
01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD Luar dan Dalam Daerah (Kali)	50	250	225.000.000,00	300	300.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	350	350.000.000,00	1950	1.925.000.000,00	
<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan (Unit)		0		6	1.800.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	26	7.800.000.000,00	
01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional atau lapangan untuk penunjang pelayanan ke masyarakat (unit)	15	18	2.500.000.000,00	10	4.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	12	5.000.000.000,00	76	26.500.000.000,00	
01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebelair kantor dan alat penyimpanan (Jenis)	5	7	600.000.000,00	8	900.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	5.500.000.000,00	
<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen (Lembar)	200	500	12.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	500	15.000.000,00	3000	87.000.000,00	
01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	12	250.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	72	2.000.000.000,00	
				Jumlah Sarana kesehatan yang dilakukan penyambungan listrik, tambah daya dan pemasangan air (Paket)	20	25	400.000.000,00	30	550.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	175	3.350.000.000,00	
01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan administrasi umum kantor (Org)	8	11	350.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	450.000.000,00	20	2.600.000.000,00	
<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	460	500	1.200.000.000,00	510	1.400.000.000,00	520	1.600.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	1.750.000.000,00	520	9.450.000.000,00	
01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan kerja dinas kesehatan yang di perbaiki (Jenis)	4	12	112.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	315.000.000,00	15	320.000.000,00	15	1.497.000.000,00	
01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (M2)	1	3	75.000.000,00	12	120.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	63	795.000.000,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																		
<b>2</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>152.172.353.500,00</b>		<b>216.075.914.000,00</b>		<b>229.630.217.200,00</b>		<b>529.906.436.680,00</b>		<b>249.250.231.032,00</b>		<b>263.491.487.286,80</b>	<b>1.523.565.222.098,80</b>
			Persentase balita gizi kurang		7,3	7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		22,58	2,2		2,0		1,9		1,8		1,8		1,8		
			Jumlah kematian ibu melahirkan		8	10		10		9		8		8		7		7
			Angka kematian anak balita		15	17		16		15		15		15		15		
			Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF		30	60		80		90		95		98		100		100
			Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan		60	67		70		75		80		83		85		85
			Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam		100	100		100		100		100		100		100		100
			Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)		59	110		110		110		110		110		110		85
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		94	95		95		95		95		95		95		95
			presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar		100	100		100		100		100		100		100		100
			Persentase pelayanan kesehatan ODGJ dan napza		100	100		100		100		100		100		100		100
			Persentase Imunisasi Dasar lengkap		87,90	93,6		94,1		94,6		95		95		95		95



2	202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	300.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.447.200.000,00
			pertemuan mtbm	Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (unit)															
2	202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	5.555	5.555	200.000.000,00	6.666	400.000.000,00	8.000	480.000.000,00	9.600	576.000.000,00	11.520	691.200.000,00	13.824	829.440.000,00	13.824	2.347.200.000,00
				Jumlah fasyankes yang mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (unit)															
2	202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	14.735	35.458	200.000.000,00	36.458	500.000.000,00	37.458	600.000.000,00	38.458	720.000.000,00	38.458	864.000.000,00	111.210	1.036.800.000,00	111.210	2.884.000.000,00
2	202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	0	159.282	215.850.000,00	#####	215.850.000,00	162.484,00	300.000.000,00	164.109,00	400.000.000,00	165.750,00	450.000.000,00	167.407,00	500.000.000,00	167.407,00	1.581.700.000,00
2	202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6.473	12.771	250.000.000	12.871,00	350.000.000	12.871,00	600.000.000	13.000,00	700.000.000	13.100,00	800.000.000	13.100,00	248.832.000,00	13.100,00	2.700.000.000,00
2	202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)		58.456	50.000.000	61.398,00	100.000.000	64.467,00	150.000.000	67.691,00	200.000.000	71.075,00	250.000.000	74.629,00	300.000.000	397.716,00	750.000.000
2	202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)		3.998	50.000.000	4.199,00	100.000.000	4.408,00	150.000.000	4.628,00	200.000.000	4.859,00	250.000.000	5.101,00	300.000.000	27.193,00	750.000.000
2	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	262	256	132.050.000,00	253	150.000.000,00	251	175.000.000,00	248	200.000.000,00	246	220.000.000,00	243	48.315.300,00	243	925.365.300
2	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terduga TB yang ditemukan dan diobati (orang)	1021	4401	35.000.000,00	4644	50.000.000,00	4644	45.000.000,00	4784	60.000.000,00	4784	65.000.000,00	4887	60.000.000,00	4887	315.000.000
2	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (orang)	6232	6543	20.000.000,00	6870	35.000.000,00	7213	50.000.000,00	7573	60.000.000,00	7951	65.000.000,00	8348	45.000.000,00	8348	275.000.000
2	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) (Kabupaten)	0	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	10.500.000.000
2	202	14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian wabah penyakit akibat virus dan vaksinasi (Kec)	0	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	35.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	3.000.000.000,00	13	114.000.000.000
2	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Bumil/balita/ remaja putri status gizi kurang yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar (orang)	925	925	805.000.000,00	1025	966.000.000,00	1125	1.062.600.000,00	1225	1.168.860.000,00	1325	1.285.746.000,00	5625	1.414.320.600,00		
				Jumlah puskesmas yang mampu menangani gizi buruk (unit)															
				Jumlah bumil kek/ balita gizi buruk/ balita kurus yang mendapatkan pmt (orang)															
2	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pembinaan kesehatan kerja dan olah raga melalui pos UKK/GP2SP/Fasyankes/Kebugaran	36/7/23/150	36/7/23/200	689.986.700	40/10/23/300	826.166.000	45/15/23/400	485.050.000	45/15/23/400	582.060.000	45/15/23/500	698.470.000	50/15/23/500	838.164.000	50/15/23/600	4.119.896.700
2	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan pada Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) /Kelurahan,kampung/Sarana Air Minum	544 TFU/33 Kamp/80 SAM	544/67/100	1.870.748.800,00	600/75/110	2.104.768.000,00	644/88/120	2.420.483.200,00	680/95/125	2.783.555.680,00	700/100/125	3.201.089.032,00	700/110/125	3.681.252.386,80	720/110/125	16.061.897.099
				Jumlah Dokumen Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas ( IPAL, TPS, dan UKL-UPL/DPLH) (dok)	1	6		8		2		3		3		5		27	
2	202	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai media komunikasi (jenis)	7	5	175.000.000,00	7	400.000.000,00	9	650.000.000,00	9	775.000.000,00	9	875.000.000,00	9	1.025.000.000,00	9	3.900.000.000
2	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,akupunktur dan asuhan mandiri dan tradisional lainnya (puskesmas)	1	12	100.000.000,00	14	400.000.000,00	16	400.000.000,00	18	400.000.000,00	20	400.000.000,00	21	400.000.000,00	21	2.100.000.000
2	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi Kasus Berpotensi KLB/Wabah (kali)	7	35	200.000.000,00	45	220.000.000,00	50	250.000.000,00	55	280.000.000,00	60	300.000.000,00	65	320.000.000,00	65	1.570.000.000
2	202	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah ODMK yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		50	50.000.000,00	55	60.000.000,00	60	65.000.000,00	65	70.000.000,00	70	75.000.000,00	75	80.000.000,00	375	400.000.000
2	202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penderita Jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)		75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	575	600.000.000
2	202	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Spesialis, melalui kunjungan Dokter Spesialis (orang)	902	152	436.000.000,00	990	523.200.000,00	1065	627.840.000,00	1065	627840000	1065	627840000	1065	627840000	5402	3.470.560.000
2	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penemuan kusta kasus baru tanpa cacat (kasus)	12	11	15.000.000,00	13	110.000.000,00	15	150.000.000,00	17	170.000.000,00	19	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	895.000.000
				Jumlah Ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu hamil (orang)	4779	4640	15.000.000,00	5500	110.000.000,00	5600	150.000.000,00	5700	170.000.000,00	5800	200.000.000,00	6000	250.000.000,00	6000	895.000.000
				Jumlah Kesaktian DBD	201	123	350.000.000,00	125	375.000.000,00	127	400.000.000,00	129	425.000.000,00	131	450.000.000,00	133	475.000.000,00	133	2.475.000.000
				Jumlah kesaktian malaria	115	90	15.000.000,00	120	200.000.000,00	150	220.000.000,00	180	250.000.000,00	210	275.000.000,00	230	300.000.000,00	230	1.260.000.000
				Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar (puskesmas)	4	21	70.000.000,00	21	90.000.000,00	21	110.000.000,00	21	130.000.000,00	21	150.000.000,00	21	170.000.000,00	21	720.000.000
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI (Desa)	59	110	200.000.000,00	110	200.000.000,00	110	220.000.000,00	110	220.000.000,00	110	250.000.000,00	110	250.000.000,00	110	1.090.000.000

2	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Jumlah Penduduk yang mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) melalui PBI Daerah (orang)	4,875	10270	4.927.744.000,00	20000	10.163.615.000,00	23108	11.587.424.000,00	34622	16.631.136.000,00	51933	24.946.704.000,00	51933	24.946.704.000,00	51,933	93.203.327.000
				Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan (orang)	15720	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	7.100.000.000,00	80577	42.600.000.000
2	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (orang)	0	50	100.000.000,00	1000	250.000.000,00	1200	300.000.000,00	1440	350.000.000,00	1728	400.000.000,00	2074	450.000.000,00	7492	1.850.000.000
2	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Sampel Penyakit Berpotensi KLB (kali)	10	10	60.000.000,00	13	70.000.000,00	15	80.000.000,00	17	90.000.000,00	20	100.000.000,00	25	110.000.000,00	25	510.000.000
2	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan kab sehat (kec)	13	13	250.000.000,00	13	300.000.000,00	13	350.000.000,00	13	400.000.000,00	13	450.000.000,00	13	500.000.000,00	13	2.250.000.000
2	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan Telemedicine (unit)	0	0	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	6	400.000.000,00	6	1.000.000.000
2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	1	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	22.000.000.000,00	2	104.000.000.000
2	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	21	21	43.000.000.000,00	21	45.000.000.000,00	21	50.000.000.000,00	21	55.000.000.000,00	21	60.000.000.000,00	21	65.000.000.000,00	21	318.000.000.000
2	202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan pembiayaan operasional (unit)	2	2	2.000.000.000,00	2	2.200.000.000,00	2	2.500.000.000,00	2	2.800.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	3.200.000.000,00	2	15.700.000.000
2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Yang Telah Tersertifikasi (fasyankes)	17	18	1.899.906.000,00	22	11.770.000.000,00	22	7.500.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	12.320.000.000,00	22	9.500.000.000,00	22	52.489.906.000
2	202	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Konfirmasi dan tindak lanjut kasus KIPPI (kasus)	0	20	20.000.000,00	20	35.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	255.000.000
2	202	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Sinyal Kewaspadaan Dini Yang di Respon (kali)	60	30	200.000.000,00	40	220.000.000,00	45	240.000.000,00	50	260.000.000,00	55	280.000.000,00	60	200.000.000,00	60	1.400.000.000
2	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya Pelayanan SPGDT	1	1	100.000.000,00	1	388.083.000,00	1	500.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	4.588.083.000
2	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Ketersediaan data dan informasi kesehatan yang akurat dan tepat waktu															
2	203	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan SIK Puskesmas (Dokumen)	21	21	150.000.000,00	21	200.000.000,00	21	250.000.000,00	21	300.000.000,00	21	350.000.000,00	21	400.000.000,00	21	1.650.000.000
2	203	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan (puskesmas)	10	10	100.000.000,00	15	120.000.000,00	20	150.000.000,00	20	160.000.000,00	21	175.000.000,00	21	200.000.000,00	21	905.000.000
2	203	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Perangkat SIK (Fasyankes)	10	10	350.000.000,00	15	1.000.000.000,00	20	1.200.000.000,00	20	1.300.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	1.500.000.000,00	21	6.850.000.000
2	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
2	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki ijin sesuai standar dan regulasi	47	62	150.000.000,00	67	200.000.000,00	72	225.000.000,00	78	275.000.000,00	83	300.000.000,00	88	325.000.000,00	88	1.475.000.000
2	204	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya RS dan Fasilitas Kesehatan yang memenuhi persyaratan dan Klasifikasi	0	0	0	2		3		3		3		3		3	-
2	204	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan peningkatan mutu pelayanan	0	0	0	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	66.000.000,00	22	330.000.000
2	204	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Dokumen SOP, dan Dokumen Peraturan Internal RS	0	0	0	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0	0	0	1	200.000.000
3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>235.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.825.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>655.000.000,00</b>
3	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota																
3	202	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pendistribusian tenaga kesehatan ke fasyankes (kali)	0	0	0	5	25.000.000,00	7	35.000.000,00	9	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	41	205.000.000,00
3	202	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah puskesmas yang tenaga kesehatannya di monitoring dan di evaluasi (sarana)	18	21	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	75.000.000	21	450.000.000,00
3	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMk yang mengikuti pelatihan (orang)	5	5	50.000.000,00	150	1.500.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	555	5.550.000.000,00
				Jumlah tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) yang mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional (orang)	30	30	-	0	-	30	105.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	0
				Jumlah Pengelola sarana pelayanan kefarmasian mengikuti Bimtek (orang)	80	80	50.000.000,00	80	60.000.000,00	80	72.000.000,00	80	86.400.000,00	80	103.680.000,00	80	124.416.000,00	80	496.496.000,00
				Jumlah Pegawai yang mengikuti sertifikasi (orang)	0	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00	5	80.000.000,00	5	90.000.000,00	5	90.000.000,00	30	455.000.000,00
				Jumlah petugas yang dilatih aplikasi SISDMK dan RENBUT	0	0	0	50	100.000.000,00	50	120.000.000,00	50	144.000.000,00	50	172.800.000,00	50	207.360.000,00	50	744.160.000,00
4			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100	100	20.449.000,00	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	230.449.000,00
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	70,00	600.800.000,00	73	743.420.000,00	76	933.683.000,00	80	1.191.860.450,00	82	1.547.827.017,50	85	2.045.782.320,13	85,00	7.063.372.787,63
				Persentase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00	200.000.000,00	65	250.000.000,00	70	300.000.000,00	75	350.000.000,00	80	400.000.000,00	85	450.000.000,00	85,00	1.950.000.000,00
4	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																
4	201	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian yang di Awasi (saryanfar)	40	40	20.449.000,00	40	25.000.000,00	45	35.000.000,00	50	40.000.000,00	55	50.000.000,00	65	60.000.000,00	65	230.449.000,00

4	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi oleh Industri Rumah Tangga															
4	203	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	351	75	115.428.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	75	150.000.000	450	865.428.000
				Jumlah Pelaku Usaha IRTP yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	351	150		150		150		150		150		150		900	
				Jumlah dokumen Pengkajian Ulang sertifikasi produksi	1	1		1		1		1		1		1		6	
4	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM ( restoran, Jasa boga, Rumah Makan ) dan DAM yang Memenuhi Syarat	380	400	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3310	3.946.185.287,6
4	204	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM siap saji dan DAM yang Memenuhi Syarat	502	487	450.800.000,00	518	518.420.000,00	551	596.183.000,00	588	685.610.450,00	611	788.452.017,50	642	906.719.820,13	3397	3.946.185.287,63
				Jumlah Pengawasan, pembinaan TPM Siap Saji dan DAM yang memenuhi syarat	680	695		710		725		735		745		755		4365	
				Jumlah Pengelola TPM Yang memiliki sertifikat kursus laik Higiene Sanitasi	502	137		110		55		55		55		55		467	
4	205		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stikerisasi TPM makanan jajanan	30	110	150.000.000	210	225.000.000	346	337.500.000	518	506.250.000	726	759.375.000	730	1.139.062.500	2640	3.117.187.500
4	205	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM Jajanan yang memenuhi syarat sesuai standar	211	215	150.000.000	226	225.000.000	232	337.500.000	260	506.250.000	280	759.375.000	293	1.139.062.500	1506	3.117.187.500
				Jumlah TPM Jajanan yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Stikerisasi	406	406		410		415		420		430		450		2531	
				Jumlah Dokumen Inventarisasi Stikerisasi Makanan Jajanan	1	1		1		1		1		1		1		6	
4	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP Yang dilakukan Pengawasan Post Market dan ditindaklanjuti	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
4	206	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pengawasan Post market IRTP	75	170	200.000.000	192	250.000.000	213	300.000.000	222	350.000.000	234	400.000.000	243	450.000.000	1274	1.950.000.000
				Jumlah Pengawasan Post market Produk IRTP	10	20		30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	270	-
				Jumlah Dokumen tindak lanjut pengawasan sarana (dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		6	
5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)</b>	<b>3,8</b>	<b>35</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>45</b>	<b>1.355.000.000,00</b>	<b>50</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.730.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.770.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>1.615.000.000,00</b>	<b>55</b>	<b>8.780.000.000,00</b>
5	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
5	201	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang terkait Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Jenis)	1	1	400.000.000,00	5	675.000.000,00	5	725.000.000,00	5	910.000.000,00	5	930.000.000,00	5	765.000.000,00	5	4.405.000.000,00
5	202		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																
5	202	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penyelenggaraan 5 Tatanan Germas dan survey PHBS (sarana)	2	0	0	21	150.000.000,00	21	175.000.000,00	21	185.000.000,00	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	21	910.000.000,00
				Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100% Intervensi Keluarga (kec)	1	3	240.000.000,00	5	255.000.000,00	7	270.000.000,00	9	285.000.000,00	11	290.000.000,00	13	300.000.000,00	13	1.640.000.000,00
5	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/kota																
5	203	1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (kali)	1	2	150.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	1.825.000.000,00